

**PENGARUH *GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT*, PERTUMBUHAN EKONOMI, LABA BUMD, INFLASI, SERTA BELANJA DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Karunia Putri Permatasari**

**NPM : 4320600005**

Diajukan Kepada:

**Program Studi Akuntansi**

**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

**Universitas Pancasakti Tegal**

**2024**



**PENGARUH *GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT*, PERTUMBUHAN EKONOMI, LABA BUMD, INFLASI, SERTA BELANJA DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

# SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh:

**Karunia Putri Permatasari**

**NPM : 4320600005**

Diajukan Kepada:

**Program Studi Akuntansi**

**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

**Universitas Pancasakti Tegal**

**2024**





# MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**MOTTO**

“There are no coincidences in this world, Allah has arranged everything as best as possible”

“Nanti engkau akan paham tentang skenario Allah yang paling indah. Disaat engkau tidak berniat mencari sesuatu, tetapi Allah justru menghadirkan Anugerah. Disaat engkau tidak pernah berpikir untuk mengejar, tapi Allah memberikan kemudahan untuk tiba-tiba engkau dapatkan”

**PERSEMBAHAN**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis persembahkan skripsi ini dengan penuh rasa hormat dan tulus kepada:

1. Ibunda tercinta, Ibu Yeyen Maryani. Terimakasih ibu atas doa, semangat, dukungan, pengorbanan, nasihat dan kasih sayang yang tak pernah henti sampai saat ini. Terima kasih atas semua yang telah ibu berikan. Saya akan selalu berusaha membuat ibu bangga.
2. Ayahanda tercinta, (Alm) Ayah Hery Susanto. Terimakasih ayah, meskipun ayah telah tiada tetapi setiap pelajaran, kasih sayang, dan kebijaksanaan yang ayah berikan selalu menyertai saya. Doa dan kenangan indah tentang ayah selalu menemani setiap langkah saya. Semoga ayah bangga dengan pencapaian saya ini dan semoga ayah tenang di sisi-Nya.
3. Adik-adikku tersayang, Diva Nurul Madinnna dan Muhammad Ardi Heriansyah. Terima kasih atas keceriaan, semangat, dukungan, dan kebersamaan yang selalu menguatkan saya.
4. Teman-teman seperjuangan, baik yang selalu ada di samping saya maupun yang mendukung dari jauh. Terima kasih atas persahabatan, bantuan, serta kebersamaan yang indah dan menyenangkan selama ini.
5. Untuk diriku sendiri, Karunia Putri Permatasari. Terima kasih telah berjuang sampai dititik ini, dan berani melangkah keluar dari zona nyaman. Skripsi ini menjadi awal dari petualangan baru, dan dengan penuh keyakinan untuk meraih mimpi yang lebih besar.
6. Almamater tercinta, Universitas Pancasakti Tegal. Terimakasih telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk belajar dan berkembang.

#



# ABSTRACT

***Karunia Putri Permatasari, 2024. The Influence of Gross Regional Domestic Product, Economic Growth, BUMD Profits, Inflation, and Regional Expenditures on Original Regional Income in Regencies/Cities in Central Java Province.***

*This research aims to determine the influence of gross regional domestic product, economic growth, BUMD profits, inflation, and regional spending on local original income in districts/cities in Central Java Province. The method used in this research is a quantitative method. The data source for this research uses secondary data. The sampling technique in this research was non-probability sampling using 35 saturated samples (census) consisting of 29 districts and 6 cities in Central Java Province for the 2018-2022 period. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using the SPSS version 22 program. The research results show that (1) Gross regional domestic product has a positive effect on original regional income in districts/cities in Central Java Province. (2) Economic growth has no effect on original regional income in districts/cities in Central Java Province. (3) BUMD profits have a positive effect on original regional income in districts/cities in Central Java Province. (4) Inflation has no effect on original income in Regencies/Cities in Central Java Province. (5) Regional spending has a positive effect on original regional income in Regencies/Cities in Central Java Province.*

***Keywords: Gross Regional Domestic Product, Economic Growth, BUMD Profits, Inflation, Regional Expenditures, Regional Original Income***

**ABSTRAK**

**Karunia Putri Permatasari, 2024. Pengaruh *Gross Regional Domestic Product*, Pertumbuhan Ekonomi, Laba BUMD, Inflasi, Serta Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *gross regional domestic product*, pertumbuhan ekonomi, laba BUMD, inflasi, serta belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan menggunakan sampel jenuh (sensus) yaitu sebanyak 35 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2022. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) *Gross regional domestic product* berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. (2) Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. (3) Laba BUMD berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. (4) Inflasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. (5) Belanja daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

**Kata Kunci: *Gross Regional Domestic Product*, Pertumbuhan Ekonomi, Laba BUMD, Inflasi, Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah**

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia - Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Pengaruh *Gross Regional Domestic Product*, Pertumbuhan Ekonomi, Laba BUMD, Inflasi, serta Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah"**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak., C.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Abdullah Mubarak, S.E., M.M., Ak., C.A., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Eva Anggra Yunita, S.E., M.Acc., Ak., selaku Dosen Pembimbing 1 yang sudah membimbing, memberikan saran dan motivasi kepada peneliti.
4. Bapak Drs. Baihaqi Fanani, M.M., Ak., C.A., selaku Dosen Pembimbing II yang sudah membimbing, memberikan saran dan motivasi kepada peneliti.

Kami menyadari skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, maka kami mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tegal, 29 April 2024

Karunia Putri Permatasari

# DAFTAR ISI

Halaman

[HALAMAN JUDUL i](#_Toc169846748)

[HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii](#_Toc169846749)

[HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI iii](#_Toc169846750)

[MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv](#_Toc169846751)

[PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI vi](#_Toc169846752)

[ABSTRAK vii](#_Toc169846753)

[KATA PENGANTAR ix](#_Toc169846754)

[DAFTAR ISI xi](#_Toc169846755)

[DAFTAR TABEL xiii](#_Toc169846756)

[DAFTAR GAMBAR xiv](#_Toc169846757)

[DAFTAR LAMPIRAN xv](#_Toc169846758)

[BAB I](#_Toc169846759) [PENDAHULUAN 1](#_Toc169846760)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc169846761)

[B. Rumusan Masalah 14](#_Toc169846762)

[C. Tujuan Penelitian 14](#_Toc169846763)

[D. Manfaat Penelitian 15](#_Toc169846764)

[BAB II](#_Toc169846765) [TINJAUAN PUSTAKA 17](#_Toc169846766)

[A. Landasan Teori 17](#_Toc169846767)

[1. Teori *Stakeholder* 17](#_Toc169846768)

[2. Pendapatan Asli Daerah 18](#_Toc169846769)

[3. *Gross Regional Domestic Product* 28](#_Toc169846770)

[4. Pertumbuhan Ekonomi 38](#_Toc169846771)

[5. Laba BUMD 45](#_Toc169846772)

[6. Inflasi 53](#_Toc169846773)

[7. Belanja Daerah 62](#_Toc169846774)

[B. Penelitian Terdahulu 72](#_Toc169846775)

[C. Kerangka Pemikiran Konseptual 80](#_Toc169846776)

[D. Hipotesis 87](#_Toc169846777)

[BAB III](#_Toc169846778) [METODE PENELITIAN 88](#_Toc169846779)

[A. Jenis Penelitian 88](#_Toc169846780)

[B. Populasi dan Sampel 88](#_Toc169846781)

[C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 90](#_Toc169846782)

[D. Metode Pengumpulan Data 92](#_Toc169846783)

[E. Metode Analisis Data 93](#_Toc169846784)

[BAB IV](#_Toc169846785) [HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 100](#_Toc169846786)

[A. Gambaran Umum 100](#_Toc169846787)

[B. Hasil Penelitian 106](#_Toc169846788)

[C. Pembahasan 123](#_Toc169846789)

[BAB V](#_Toc169846790) [KESIMPULAN DAN SARAN 133](#_Toc169846791)

[A. Kesimpulan 133](#_Toc169846792)

[B. Saran 134](#_Toc169846793)

[DAFTAR PUSTAKA 137](#_Toc169846794)

[LAMPIRAN 142](#_Toc169846795)

# DAFTAR TABEL

**Tabel Halaman**

[Tabel 1. 1 Realisasi PAD Provinsi Jawa Tengah 2018-2022 8](#_Toc168895685)

[Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 77](#_Toc168895699)

[Tabel 3. 1 Daftar Sampel 89](#_Toc168895726)

[Tabel 3. 2 Operasional Variabel 92](#_Toc168895727)

[Tabel 4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 106](#_Toc170893213)

[Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas 110](#_Toc170893214)

[Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas 112](#_Toc170893215)

[Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi 113](#_Toc170893216)

[Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas 114](#_Toc170893217)

[Tabel 4. 6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 116](#_Toc170893218)

[Tabel 4. 7 Hasil Uji F (Uji Kelayakan Model) 118](#_Toc170893219)

[Tabel 4. 8 Hasil Uji t (Uji Parsial) 120](#_Toc170893220)

[Tabel 4. 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 122](#_Toc170893221)

# DAFTAR GAMBAR

**Gambar Halaman**

[Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Konseptual 86](#_Toc168896542)

# DAFTAR LAMPIRAN

**LAMPIRAN Halaman**

[LAMPIRAN 1 143](#_Toc168913045)

[LAMPIRAN 2 143](#_Toc168913046)

[LAMPIRAN 3 149](#_Toc168913047)

[LAMPIRAN 4 154](#_Toc168913048)

[LAMPIRAN 5 159](#_Toc168913049)

[LAMPIRAN 6 164](#_Toc168913050)

[LAMPIRAN 7 169](#_Toc168913051)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah usaha untuk mencapai tujuan nasional Indonesia yang tercermin dalam alinea keempat pembukaan UUD Tahun 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila dan UUD Tahun 1945 memberikan dasar konseptual dan rancangan demokrasi dalam pembangunan sesuai dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia (Alhusain dkk., 2017).

Tantangan besar dalam mencapai tujuan pembangunan ini yaitu disebabkan oleh keragaman geografis, jumlah penduduk, potensi sumber daya, adat istiadat, dan taraf hidup di Indonesia. Oleh karena itu, negara mengimplementasikan strategi pembangunan yang beradaptasi dengan karakteristik setiap daerah (Alhusain dkk., 2017).

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, negara berupaya dalam mewujudkan pembangunan nasional yang merata dan adil melalui implementasi sistem pemerintahan daerah yang otonom, memastikan pemberian hak dan kewajiban yang sama kepada seluruh rakyat, serta mengatasi kendala pembangunan di berbagai daerah (Alhusain dkk., 2017).

Pemberian kewenangan yang luas, konkret, dan bertanggung jawab di daerah yang direalisasikan melalui regulasi, pembagian, dan optimalisasi sumber daya nasional secara adil dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, serta menjaga perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah melalui desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai sumber pendanaan pemerintahan daerah (F. Amin, 2019).

Setiap pengalihan atau delegasi wewenang dari pemerintah pusat ke daerah untuk desentralisasi dan dekonsentrasi melibatkan pemindahan sumber daya manusia dan fasilitas, serta penentuan alokasi anggaran untuk memastikan kelancaran proses pengalihan kewenangan tersebut. Sementara itu, pemberian tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada daerah juga melibatkan alokasi anggaran (Mardiasmo, 2002).

Ciri utama suatu daerah otonom yang efektif dalam menjalankan perannya adalah terletak pada kemampuan keuangannya. Dengan kata lain, daerah otonom harus memiiki wewenang dan kapabilitas untuk menghasilkan sumber keuangan sendiri, memungkinkannya untuk mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan dana sendiri secara memadai untuk mendukung operasional pemerintahannya (F. Amin, 2019).

Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusannya sendiri, secara tak langsung akan mendorong untuk mengeksplorasi potensi baru dalam mendukung urusan pemerintahan dan pembangunan sehari-hari, termasuk dalam aspek ekonomi dan penyediaan layanan yang memuaskan bagi masyarakat yang membayar pajak atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Patarai, 2016).

Otonomi daerah dan desentralisasi fisikal merupakan upaya untuk memberikan kemandirian finansial kepada pemerintah daerah. Dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan daerah, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu indikator penting dalam menilai kinerja keuangan daerah adalah pendapatan asli daerah (Mahfudh dkk., 2022).

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan asli yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program otonomi daerah. Tingkat pendapatan asli sebuah daerah memengaruhi kesuksesan otonomi daerahnya. Ketersediaan pendapatan daerah memungkinkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal. Dengan kata lain, semakin besar pendapatan yang diperoleh suatu daerah, semakin besar potensi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya (Yunita dkk., 2018).

Citra keuangan pemerintah daerah tercermin dari besarnya pendapatan asli daerah dan cara alokasi keuangan untuk mendukung kegiatan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah perlu menganalisis potensi di daerahnya dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah. Pengembangan potensi tersebut akan menciptakan pendapatan asli daerah yang mendukung tujuan pembangunan. Dengan demikian, menuju kemandirian daerah dalam pembiayaan, pengelolaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dapat terwujud secara berkelanjutan (Mahfudh dkk., 2022).

Faktor pertama dalam pendapatan asli daerah yaitu *Gross Regional Domestic Product* (GRDP) atau biasa disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*. Gross regional domestic product* merupakan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu wilayah dalam periode waktu tertentu (Iman dkk., 2019). Jika suatu wilayah memiliki banyak sumber daya alam dan mengelolanya dengan efisien, maka GRDP wilayah tersebut akan meningkat (Juliansyah dan Sulkadria, 2018).

*Gross regional domestic product* merupakan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk lokal dan penduduk asing di wilayah tersebut. Tingkat GRDP yang tinggi secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan pajak daerah, sehingga penerimaan pendapatan asli daerah juga meningkat (Juliansyah dan Sulkadria, 2018).

Faktor kedua dalam pendapatan asli daerah yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan bertahap menuju keadaan yang lebih baik secara ekonomi. Hal ini adalah upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan wilayah tersebut. Setiap wilayah bersaing untuk meningkatkan perekonomiannya, yang dapat diukur dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang dari tahun ke tahun (Juwita dan Widia, 2022).

Pertumbuhan ekonomi yang positif di suatu wilayah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau dalam setiap sektor usaha dari tahun ke tahun dapat dilihat melalui GRDP atas dasar harga konstan. Dikatakan harga konstan, karena penilaian yang digunakan didasarkan pada harga satu tahun dasar tertentu (Juwita dan Widia, 2022).

Faktor ketiga dalam pendapatan asli daerah yaitu laba BUMD. Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah Pendapatan yang diperoleh dari perusahaan umum dan perseroan daerah. BUMD berperan dalam meningkatkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi melalui pembayaran deviden dan pajak. Pemerintah Daerah mendirikan BUMD berdasarkan sumber daya alam yang dimilikinya sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Siahaan, 2013).

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang telah mengalami peningkatan meskipun peningkatannya masih tertinggal dibandingkan dengan sumber pendapatan asli daerah lainnya. Meskipun masih tertinggal, sumber ini masih memiliki potensi peningkatan pendapatan yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, diharapkan potensi sumber pendapatan ini dapat dimaksimalkan sehingga penerimaan pendapatan asli daerah dapat meningkat lebih lanjut (Suhendra, 2019).

Perolehan sumber dana hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk berasal dari laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain untuk kesejahteraan masyarakat, tujuan keberadaan BUMD adalah mencapai keuntungan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui dividen yang disetor ke kas daerah. Dividen yang diperoleh BUMD akan menjadi pendapatan bagi pemerintah daerah, yang akan meningkatkan kemampuan APBD untuk membiayai pembangunan daerah (Suhendra, 2019).

Faktor keempat dalam pendapatan asli daerah yaitu inflasi. Akibat kenaikan harga barang dan jasa mengakibatkan penurunan nilai mata uang dan melemahnya daya beli. Hal tersebut akan berdampak terhadap individu, dunia usaha, serta anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Inflasi yang tinggi akan berdampak negatif terhadap suatu perekonomian secara menyeluruh. Namun, penurunan nilai mata uang sebagai akibat inflasi dampaknya tidak akan sama terhadap seluruh masyarakat (Suseno dan Astiyah, 2009).

Inflasi juga akan mengubah struktur pajak pendapatan atau keuntungan yang dikenakan oleh pemerintah kepada masyarakat, termasuk pajak untuk individu dan badan usaha yang umumnya bersifat progresif. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pendapatan/laba, semakin besar tarif pajaknya. Oleh karena itu, kenaikan pendapatan atau keuntungan tersebut tidak selalu mencerminkan peningkatan daya beli yang sebenarnya karena sebagian dari pendapatan/laba tersebut terkikis oleh inflasi (Suseno dan Astiyah, 2009).

Faktor terakhir dalam pendapatan asli daerah yaitu belanja daerah. Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan dan program dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjalankan fungsi pemerintahan (Rafsanjani dan Suharno, 2022). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.

Pendapatan daerah di Indonesia hampir seluruhnya bergantung pada sektor pajak sebagai sumber utama untuk meningkatkan pendapatan (Fanani dkk., 2023). Tingkat pendapatan seseorang juga mencerminkan kemampuannya untuk membayar berbagai pungutan pemerintah. Dengan prinsip yang sama, pada tingkat distribusi pendapatan yang tetap, GRDP perkapita riil yang tinggi di suatu daerah mencerminkan kemampuan masyarakat setempat untuk membiayai kebutuhan rutin dan proyek pembangunan pemerintah, serta potensi sumber penerimaan daerah yang lebih besar (Mahfudh dkk., 2022).

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Artinya, pendapatan asli daerah tidak mengalami peningkatan secara terus menerus setiap tahun, melainkan juga mengalami penurunan pada tahun tertentu. Adapun realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah sepanjang 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1

Realisasi PAD Provinsi Jawa Tengah 2018-2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Target** | **Realisasi** | **%** |
| 2018 | 13.396.772.661.000,00 | 13.711.836.037.849,34 | 102,35 |
| 2019 | 14.488.333.544.000,00 | 14.437.914.236.398,00 | 99,65 |
| 2020 | 14.267.084.822.000,00 | 13.668.282.278.855,00 | 95,80 |
| 2021 | 15.017.805.787.000,00 | 14.695.474.898.162,00 | 97,85 |
| 2022 | 16.141.754.406.000,00 | 16.264.618.853.852,00 | 100,76 |

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2024 (diolah)

Fenomena dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel 1.1 Realisasi pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Target pendapatan asli daerah tahun anggaran 2018 sebesar Rp13.396.772.661.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.711.836.037.849,34 atau 102,35%, mengalami kenaikan sebesar Rp1.164.322.648.449,34 atau 9,28% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017.

Kenaikan tersebut bersumber dari pajak kendaraan bermotor, pajak BPKB, pajak air permukaan, pajak bumi dan bangunan dan pajak rokok. Pendapatan paling banyak berasal dari pajak kendaraan bermotor mencapai 40%. Selain itu, pemerintah melakukan pengoptimalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Jawa Tengah yang diharapkan dapat menambah pemasukan terutama melalui sektor jasa keuangan seperti Bank Jateng dan BPR BKK di tiap kota/kabupaten dengan cara *roadshow* ke 35 cabang Bank Jateng tiap daerah agar tiap cabang semakin maksimal menghasilkan laba untuk menunjang pendapatan asli daerah.

Target pendapatan asli daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp14.488.333.544.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.437.914.236.398,00 atau 99,65%, mengalami kenaikan sebesar Rp725.943.074.406,66 atau 5,29% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018.

Kenaikan tersebut bersumber dari kinerja BUMD yang semakin baik. Deviden yang diberikan BUMD sebagai pendapatan asli daerah terus meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 14,60% per tahun dengan cara evaluasi kinerja secara periodik agar target pendapatan terlampaui, kerja sama investasi dengan pihak ketiga, mendorong sinergi antar BUMD, penambahan penyertaan modal BUMD keuangan untuk meningkatkan *share* saham serta pemenuhan regulasi, mendorong implementasi *Good Corporate Government* dan mendayagunakan pengelolaan aset.

Target pendapatan asli daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp14.267.084.822.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.668.282.278.855.00 atau 95,80%, mengalami penurunan sebesar Rp769.631.957.543,00 atau 5.33% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019.

Penurunan tersebut disebabkan oleh dampak masa pandemi Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat yang berimbas pada penerimaan pajak kendaraan bermotor. Selama pandemi, kegiatan penagihan langsung (*door to door*) dan razia bersama kepolisian tidak dapat dilakukan. Pandemi juga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru, sehingga memengaruhi penerimaan Bea Balik Nama. Pembatasan mobilitas masyarakat menyebabkan penurunan konsumsi BBM dan penerimaan PBBKB. Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu, serta penggunaan dan pemanfaatan aset daerah juga belum optimal.

Target pendapatan asli daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp15.017.805.787.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.695.474.898.162,00 atau 97,85%, mengalami kenaikan sebesar Rp1.027.192.619.307,00 atau 7,52% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2020.

Kenaikan tersebut disebabkan oleh pemulihan pendapatan asli daerah setelah mengalami tekanan akibat Pandemi Covid-19 tahun lalu, diantaranya yang mengalami kenaikan pesat adalah realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu realisasi atas pelayanan pada rumah sakit (khususnya klaim pelayanan Covid 19) dan menagih pajak kendaraan secara *door to door* serta menjalin kerja sama dengan Bank Jateng untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) secara non tunai.

Target pendapatan asli daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp16.141.754.406.000,00 dan terealisasi sebesar Rp16.264.618.853.852,00 atau 100,76%, mengalami kenaikan sebesar Rp1.569.143.955.690.00 atau 10,68% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021.

Kenaikan tersebut disebabkan oleh optimalisasi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah. Di bidang pajak kendaraan bermotor, pendapatan meningkat berkat perluasan basis pelayanan, memudahkan masyarakat membayar pajak, serta memutakhirkan data dan mengembangkan sistem informasi. Di bidang retribusi, perbaikan regulasi dan validasi *roadmap* pemetaan objek kekayaan daerah dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan menyesuaikan tarif retribusi. Dalam pengelolaan kekayaan daerah, perbaikan tata kelola dan perubahan kelembagaan BUMD menjadi Perseroda dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dalam mengelola proses bisnisnya.

Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah ditempuh melalui berbagai langkah strategis. Pertama, diperlukan penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, inventarisasi dan optimalisasi pendayagunaan aset-aset daerah menjadi fokus penting, dengan tujuan agar aset tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain juga menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Terakhir, diperlukan dorongan terhadap diversifikasi usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan mempertimbangkan potensi wilayah daerah. Upaya ini juga didukung dengan penguatan struktur permodalan BUMD melalui penyertaan modal, sehingga BUMD dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah.

Keberhasilan dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah menjadi indikator penting dalam mengevaluasi seberapa mandiri dan berkelanjutan keuangan sebuah pemerintah daerah. Dengan pendapatan asli daerah yang kuat dan beragam, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat dan memperkuat posisi finansialnya untuk melaksanakan program-program pembangunan serta pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan dan strategi yang mendukung peningkatan pendapatan asli daerah harus menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan otonomi daerah dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Objek penelitian yang menarik untuk diteliti yaitu pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah karena Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kabupaten/kota yang cukup banyak, sehingga memberikan keragaman data yang memadai untuk analisis. Kemudian, dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kemampuan fiskal daerah dalam mengelola sumber daya mereka secara mandiri, yang dapat menjadi indikator keberhasilan desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, baik dari sisi potensi ekonomi daerah, kebijakan pemerintah daerah, maupun tingkat partisipasi masyarakat.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi pemerintah daerah dalam mengungkapkan tantangan dan peluang spesifik yang dihadapi oleh setiap daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut, yang berguna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Terdapat beberapa penelitian tentang pendapatan asli daerah sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Luh dkk. (2021), menyatakan bahwa *gross regional domestic product* berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali. Kemudian, menurut Wadjaudje dkk. (2018), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, menurut Yuniarti dkk. (2023), menyatakan bahwa laba BUMD berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Batanghari. Selain itu, menurut Luh dkk. (2021), menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali. Terakhir, menurut Iman dkk. (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui **“Pengaruh *Gross Regional Domestic Product*, Pertumbuhan Penduduk, Laba BUMD, Inflasi, Serta Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”**.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti dapat merumuskan beberapa rumusan masalah yang diuraikan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

1. Apakah *gross regional domestic product* berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah laba BUMD berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah inflasi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
5. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *gross regional domestic product* terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh laba BUMD terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

## Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. **Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian ini yaitu dapat menjadi tambahan literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan mengenai pemerintah daerah khususnya tentang pendapatan asli daerah, serta mendorong penelitian lanjutan dan pengembangan teori yang lebih maju.

1. **Manfaat Praktis**
2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman ilmu khususnya dalam pemerintah daerah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah.

1. Bagi Penulis
2. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang *gross regional domestic product,* pertumbuhan penduduk, laba BUMD, inflasi, belanja daerah dalam pendapatan asli daerah.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Universitas Pancasakti Tegal.
4. Bagi Instansi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pemerintah daerah dan perusahaan atau organisasi daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah.

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada masyarakat atau tentang pentingnya kewajiban membayar pajak. Dengan diketahuinya informasi tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui partisipasi masyarakat.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## Landasan Teori

### Teori *Stakeholder*

*Grand Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori *stakeholder*. Teori *Stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh Standford Research Institute (SRI) pada tahun 1963. Konsep stakeholder pada dasarnya didefinisikan sebagai *Those Groups Without Whose Support the Organization Would Cease to Exist* (Freeman, 1984). Selain itu, asumsi teori *stakeholder* yang disampaikan oleh Freeman (1984), adalah bahwa efektivitas suatu organisasi dapat diukur berdasarkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan bukan hanya pemegang saham, melainkan juga pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam organisasi.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011, Pemangku kepentingan (*stakeholder*) merupakan pihak-pihak baik dari dalam maupun luar organisasi (internal dan eksternal) yang memiliki kepentingan serta memengaruhi kinerja, eksistensi, dan kelangsungan hidup organisasi. *Stakeholder* internal mencakup individu atau kelompok yang terlibat langsung dalam kegiatan organisasi atau instansi pemerintah, sementara *stakeholder* eksternal adalah publik yang berada di luar organisasi/instansi dan memerlukan informasi untuk menjaga hubungan yang baik.

Pemangku kepentingan internal maupun eksternal perlu disesuaikan dengan karakteristik organisasi/instansi, termasuk bentuk, sifat, jenis, dan karakter yang dimilikinya. Dalam organisasi sektor publik yang memiliki cakupan lebih luas dan beragam, pemerintah daerah harus selaras dengan kepentingan masyarakat, dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus memberikan penekanan pada aspek kepentingan rakyat sebagai pemangku kepentingan utama.

Teori *Stakeholder* beranggapan bahwa pihak yang memiliki kepentingan terhadap sebuah organisasi memiliki kemampuan untuk mengontrol atau memengaruhi keputusan terkait penggunaan sumber daya ekonomi. Dalam praktiknya, teori *stakeholder* mendorong partisipasi dari seluruh pihak terkait sejak tahap perencanaan anggaran disusun dengan mempertimbangkan kemampuan daerah, kebutuhan daerah, dan kebutuhan masyarakat. Keberadaan para pemangku kepentingan diharapkan dapat mendorong pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang efektif terkait manajemen keuangan daerah, dengan fokus utama pada optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah sesuai dengan sumber daya yang tersedia di wilayah tersebut (Ariyani dkk., 2018).

### Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai indikator kinerja ekonomi suatu wilayah (Priyono dan Handayani, 2021). Sedangkan menurut Juwita dan Widia (2022), pendapatan asli daerah merupakan bagian dari pendapatan daerah yang berasal dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peningkatan pendapatan asli daerah menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target pembangunan daerah. pendapatan asli daerah memegang peran penting dalam menentukan kemampuan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, seperti menyediakan layanan publik dan mendorong pembangunan (Aryadi dkk., 2019).

Upaya mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah, mengelola kekayaan daerah yang terpisah, serta memiliki kebijakan diskresi untuk menetapkan tarif yang sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang sah. Meskipun demikian, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pelaksanaannya tetap mengikuti prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dengan mempertimbangkan potensi daerah.

1. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah meliputi:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah sumbangan keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat I maupun tingkat II. Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin dan pembangunan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang yang lebih besar untuk mengeksplorasi potensi penerimaan daerah dan menetapkan sumber penerimaan yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dijelaskan bahwa pajak daerah terdiri atas:

1. Pajak Provinsi

Pajak provinsi merupakan pemungutan pajak yang disahkan oleh gubernur sebagai kepala daerah Tingkat I, dan menjadi bagian dari pendapatan provinsi. Jenis-jenis pajak provinsi, terdiri atas:

1. Pajak kendaraan bermotor;
2. Pajak kendaraan di atas air;
3. Bea balik nama kendaraan bermotor;
4. Bea balik nama kendaraan di atas air;
5. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
6. Pajak pengambilan dan pemanfaatan.
7. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak kabupaten/kota adalah pemungutan pajak yang disahkan oleh Bupati/Walikota sebagai kepala daerah Tingkat II, dan menjadi bagian dari pendapatan kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak kabupaten/kota, terdiri atas:

1. Pajak hotel;
2. Pajak restoran;
3. Pajak hiburan;
4. Pajak reklame;
5. Pajak penerangan jalan;
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan c;
7. Pajak parkir;
8. Pajak air tanah;
9. Pajak sarang burung walet;
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
12. Retribusi Daerah

Retribusi merupakan tarif daerah yang dikenakan sebagai pembayaran atas layanan atau izin tertentu yang secara khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk keperluan orang pribadi atau badan. Berdasarkan objeknya, retribusi dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu (H. Amin, 2017):

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pemungutan biaya atas pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan manfaat umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum, meliputi:

1. Retribusi Provinsi
2. Retribusi pelayanan kesehatan;
3. Retribusi pengujian kendaraan bermotor (sebagaian sudah diserahkan kepada kabupaten/kota);
4. Retribusi penggantian biaya cetak peta; dan
5. Retribusi pengujian kapal perikanan.
6. Retribusi Kabupaten/Kota
7. Retribusi pelayanan kesehatan;
8. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
9. Retribusi penggantian biaya cetak ktp dan akte catatan sipil;
10. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
11. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
12. Retribusi pelayanan pasar;
13. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
14. Retribusi pemeriksaan alat pemadaman kebakaran;
15. Retribusi penggantian biaya cetak peta; dan
16. Retribusi pengujian kapal perikanan.
17. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pemungutan biaya atas pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan pendekatan komersial, karena pada dasarnya dapat juga disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha, meliputi:

1. Retribusi Provinsi
2. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
3. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan;
4. Retribusi penjualan produksi usaha daerah;
5. Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
6. Retribusi pengolahan limbah cair;
7. Retribusi tempat pendaratan kapal;
8. Retribusi tempat rekreasi dan olag raga; dan
9. Retribusi penyebrangan diatas air.
10. Retribusi Kabupaten/Kota
11. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
12. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
13. Retribusi tempat pelelangan;
14. Retribusi terminal;
15. Retribusi tempat parkir khusus;
16. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
17. Retribusi penyedotan kakus;
18. Retribusi rumah potong hewan;
19. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal;
20. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
21. Retribusi penyebrangan di atas air;
22. Retribusi pengolahan limbah cair; dan
23. Retribusi penjualan penjualan produksi usaha daerah.
24. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah pemungutan biaya yang dikenakan oleh pemerintah daerah saat memberikan izin kepada orang pribadi atau badan, yang bertujuan untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu demi melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perijinan tertentu, meliputi:

1. Retribusi Provinsi
2. Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah; dan
3. Retribusi izin trayek.
4. Retribusi Kabupaten/Kota
5. Retribusi izin mendirikan bangunan;
6. Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah;
7. Retribusi izin pengambilan hutan ikutan;
8. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
9. Retribusi izin gangguan; dan
10. Retribusi izin trayek.
11. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah bagian kekayaan negara yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan merupakan aspek keuangan khusus yang terdapat di negara-negara nonpublik. Pemerintah melakukan investasi pada BUMN, BUMD, atau lembaga keuangan negara/daerah lainnya, mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban negara terkait dengan investasi tersebut. Hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dapat bersumber dari (Nasution, 2019):

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
3. Bagian laba atas penyertaan modal atas perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dialokasikan untuk perencanaan penerimaan daerah, melibatkan sumber-sumber yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis-jenis pendapatan tersebut dibedakan berdasarkan objek pendapatan, meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Perndapatan bunga;
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terdapat mata uang asing; dan
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sevagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.
6. Penyebab Rendahnya Pendapatan Asli Daerah

Menurut Jaya (1996), rendahnya pendapatan asli daerah yang menyebabkan ketergantungan tinggi pada pusat dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Peran perusahaan daerah yang kurang efektif sebagai sumber pendapatan daerah;
2. Tingginya tingkat sentralisasi dalam bidang perpajakan, karena pemerintah pusat menarik semua jenis pajak utama yang paling produktif, baik pajak langsung maupun tidak langsung;
3. Meskipun pajak daerah beragam, tetapi hanya sedikit yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan;
4. Alasan politis, di mana banyak orang khawatir bahwa pendapatan tinggi di daerah dapat menyebabkan disintegrasi dan separatisme; dan
5. Kelemahan dalam subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang memberikan kewenangan yang lebih kecil untuk merencanakan pembangunan di wilayahnya.
6. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut (Suhendra, 2019):

1. Menyesuaikan tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan harga dan tingkat inflasi, karena banyak tarif pajak daerah yang telah lama ditetapkan dan tidak pernah diubah, sehingga terlalu rendah dibandingkan dengan perkembangan harga;
2. Menetapkan tarif pajak baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk potensi wajib pajak baru di daerah terkait;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah dengan melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan objek pajak tertentu;
4. Menciptakan lingkungan dan iklim yang mendukung pengembangan investasi dan perekonomian kota, serta memfasilitasi investor domestik dan asing untuk berinvestasi di daerah;
5. Peningkatan insentif bagi pejabat dan personil yang terlibat dalam pengelolaan pendapatan;
6. Intensifikasi pelayanan dan prosedur keuangan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, dengan perbaikan kualitas organisasi dan pelayanan kepada wajib pajak; dan
7. Ekstensifikasi melalui usaha dan penambahan objek pajak untuk menggali sumber pendapatan daerah dan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.

### *Gross Regional Domestic Product*

1. Konsep Domestik dan Regional

Wilayah perekonomian yang akan disensus untuk menghitung pendapatan nasional adalah suatu negara, sementara untuk menghitung pendapatan regional adalah suatu daerah di dalam negara tersebut. Daerah ini dapat mencakup Provinsi (Daerah Tingkat I), Kabupaten/Kota (Daerah Tingkat II), dan Desa. Perhitungan ekonomi akan mencakup transaksi yang terjadi di wilayah domestik daerah tersebut dan transaksi yang dilakukan oleh penduduk setempat (BPS RI, 2008).

1. Produk domestik dan produk regional

*Gross Regiomal Domestic Bruto* (GRDP) adalah total nilai tambah yang dihasilkan oleh semua perusahaan dalam suatu wilayah atau jumlah nilai bersih barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua entitas ekonomi di wilayah tersebut (Logaritma, 2020). Barang dan jasa yang dihasilkan melalui kegiatan ekonomi di wilayah domestik, tanpa memperhitungkan asal usul faktor produksinya atau kepemilikannya oleh penduduk setempat, disebut sebagai produk domestik daerah (BPS RI, 2008).

Pendapatan yang muncul dari kegiatan produksi tersebut disebut pendapatan domestik. Wilayah domestik suatu daerah mencakup daratan dan perairan yang berada dalam batas geografis daerah tersebut, termasuk wilayah administratif seperti Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa.

Faktanya, sebagian faktor produksi dalam kegiatan produksi suatu daerah dapat berasal dari daerah lain atau luar negeri, dan sebaliknya, faktor produksi dari penduduk daerah tersebut dapat terlibat dalam produksi di daerah lain atau luar negeri. Hal ini menyebabkan perbedaan antara nilai produk domestik daerah dan pendapatan yang diterima oleh penduduknya. Arus pendapatan antardaerah (termasuk dari dan ke luar negeri), seperti upah, bunga, deviden, dan keuntungan, menyebabkan perbedaan antara produk domestik dan produk regional.

Produk regional menggabungkan produk domestik dengan pendapatan yang diterima dari luar daerah atau negeri dikurangi pendapatan yang dibayarkan ke luar daerah atau negeri tersebut. Dengan demikian, produk regional mencerminkan produk yang dihasilkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah (BPS RI, 2008).

1. Penduduk

Penduduk suatu daerah merupakan orang pribadi atau anggota rumah tangga yang tinggal secara tetap di wilayah domestik daerah tersebut, kecuali dalam situasi berikut (BPS RI, 2008):

1. Wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) dari daerah lain yang tinggal di wilayah domestik daerah tersebut kurang dari 6 bulan, dengan tujuan seperti berlibur, berobat, beribadah, kunjungan keluarga, pertandingan olahraga nasional/internasional, konferensi, atau kegiatan belajar dan penelitian;
2. Awak kapal laut dan pesawat udara luar negeri/luar daerah yang kapalnya sedang masuk dok atau singgah di daerah tersebut;
3. Pengusaha asing dan pengusaha daerah lain yang berada di daerah tersebut kurang dari 6 bulan, termasuk pegawai perusahaan asing dan pegawai perusahaan daerah lainnya yang berada di wilayah domestik daerah tersebut kurang dari 6 bulan, contohnya untuk pemasangan jembatan atau peralatan yang dibeli dari mereka;
4. Pekerja musiman yang tinggal dan bekerja di wilayah domestik daerah tersebut dengan status sebagai pegawai musiman;
5. Anggota Korps Diplomatik, konsulat, yang ditempatkan di wilayah domestik daerah tersebut; dan
6. Pegawai badan internasional/nasional yang bukan penduduk daerah tersebut yang menjalankan misi selama kurang dari 6 bulan.
7. Agregat *Gross Regional Domestic Product*
8. GRDP atas dasar harga berlaku (nominal) mencerminkan potensi sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Jumlah PDRB yang besar menunjukkan kapasitas ekonomi yang besar, demikian juga sebaliknya.
9. GRDP atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi keseluruhan atau pada setiap sektor usaha dari tahun ke tahun
10. Distribusi GRDP batas dasar harga berlaku menurut sektor usaha mencerminkan struktur perekonomian dan kontribusi masing-masing sektor usaha dalam suatu wilayah. Sebuah sektor usaha yang memiliki kontribusi besar menunjukkan dasar ekonomi wilayah tersebut.
11. GRDP per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai GRDP per individu atau per penduduk suatu wilayah
12. GRDP per kapita atas dasar harga konstan bermanfaat untuk memahami pertumbuhan ekonomi nyata per individu penduduk suatu wilayah (Logaritma, 2020).
13. Susunan *Gross Regional Domestic Product*
14. GRDP Menurut Lapangan Usaha

Penyajian GRDP menurut lapangan usaha akan memberikan pandangan tentang kontribusi masing-masing sektor dalam menciptakan nilai tambah di suatu daerah. Oleh karena itu, unit-unit produksi dikelompokkan berdasarkan lapangan usaha atau sektor, dan selanjutnya nilai tambah bruto dari setiap sektor tersebut disajikan berdasarkan harga pasar. GRDP menurut lapangan usaha dikelompokkan dalam sembilan sektor:

1. Pertanian; Tanaman Bahan Makanan, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalian;
3. Industri pengolahan;
4. Listrik, Gas dan Air Minum;
5. Bangunan;
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran;
7. Pengangkutan dan Komunikasi;
8. Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan; dan
9. Jasa-Jasa.
10. GRDP Menurut Andilnya Faktor Produksi

GRDP menurut andilnya faktor produksi, dengan menggambarkan besarnya balas jasa yang diterima oleh setiap faktor produksi. Balas jasa faktor produksi tersebut adalah:

1. Balas jasa yang diterima oleh pekerja berupa upah dan gaji;
2. Pendapatan dari unit-unit produksi yang tidak berbadan hukum;
3. Pendapatan dari sewa tanah dan royalti;
4. Bunga; dan
5. Keuntungan.
6. GRDP Menurut Jenis Penggunaan

Penyajian dalam bentuk ini menggambarkan cara barang dan jasa akhir digunakan oleh berbagai kegiatan ekonomi. Penggunaan melibatkan konsumsi, baik oleh rumah tangga maupun pemerintah, penggunaan sebagai barang modal tetap, dan ekspor neto. Sementara itu, barang dan jasa yang belum digunakan pada tahun laporan dihitung sebagai perubahan stok. Secara terinci penyajian akan berbentuk sebagai berikut:

1. Pengeluaran akhir konsumsi rumah tangga;
2. Pengeluaran akhir konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung;
3. Pengeluaran akhir konsumsi pemerintah;
4. Pembentukan modal tetap bruto;
5. Perubahan stok; dan
6. Ekspor neto (Ekspor-Impor) (BPS RI, 2008).
7. Metode Perhitungan *Gross Regional Domestic Product*
8. Metode Perhitungan GRDP Atas Dasar Harga Berlaku
9. Pendekatan Langsung

Pendekatan langsung merupakan cara perhitungan yang menggunakan data yang diperoleh langsung dari daerah. Metode ini dapat menampilkan gambaran karakteristik sosial-ekonomi setiap daerah (BPS RI, 2008). Pendekatan langsung dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Produksi

GRDP adalah total Nilai Tambah Bruto (NTB) dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada suatu periode tertentu. NTB dihitung dengan mengurangkan komponen biaya (input antara) dari output.

Output mencakup nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari proses produksi. Secara teknis, output suatu komoditas adalah hasil perkalian antara jumlah produksi dan harga jual per unit, diukur pada tingkat produsen.

Biaya antara mencakup nilai seluruh barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi, dengan karakteristik khusus seperti usia pakai yang pendek, habis dalam satu periode produksi, biasanya tidak lebih dari satu tahun. Pendekatan ini memberikan gambaran GRDP dari sisi penawaran.

1. Pendekatan Pendapatan

GRDP adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi di suatu daerah selama periode tertentu. Faktor-faktor produksi upah /gaji, sewa , bunga dan laba/Keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya.

1. Pendekatan Pengeluaran

GRDP adalah jumlah komponen pengeluaran mencakup konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto/investasi, dan selisih ekspor-impor. Pendekatan pengeluaran juga dikenal sebagai metode penggunaan, mencerminkan GRDP dari sisi permintaan.

1. Metode Tidak Langsung (Metode Alokasi)

Metode tidak langsung adalah cara perhitungan dengan menggunakan alokasi, mengalokasikan pendapatan regional Provinsi ke pendapatan regional Kabupaten/Kota dengan menggunakan berbagai indikator produksi atau indikator lain yang sesuai sebagai alokator.

Alokator dapat didasarkan pada nilai produksi bruto atau neto, jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, atau alokator lain yang dianggap sesuai untuk daerah tersebut. Dengan menggunakan satu atau kombinasi alokator tersebut, dapat dihitung persentase bagian masing-masing Kabupaten/Kota terhadap nilai tambah setiap sektor atau subsektor (BPS RI, 2008).

1. Metode Penghitungan GRDP Atas Dasar Harga Konstan
2. Pendekatan untuk menghitung nilai tambah sektoral atas dasar harga konstan

Nilai tambah bruto sektoral atas dasar harga konstan dapat dihitung dengan cara menggunakan dua teknik yaitu (BPS RI, 2008):

1. Teknik Indikator Ganda

Metode ini juga sering disebut sebagai metode deflasi ganda. Dalam pendekatan ini, estimasi harga konstan untuk setiap nilai produksi dan biaya dibuat secara terpisah. Perhitungan harga konstan untuk setiap nilai produksi atau biaya dapat dilakukan melalui revaluasi, ekstrapolasi, atau deflasi. Setelah mendapatkan estimasi harga konstan, nilai output dan biaya harga konstan dikurangkan untuk menghasilkan nilai tambah harga konstan.

1. Teknik Indikator Tunggal

Dalam metode indikator tunggal, nilai tambah harga konstan dihitung secara langsung dengan menerapkan metode deflasi pada nilai tambah harga berlaku atau menggunakan metode ekstrapolasi kuantitas terhadap nilai tambah pada tahun dasar. Dengan metode deflasi, nilai tambah bruto harga konstan dihitung dengan membagi nilai tambah bruto tahun berjalan dengan indeks harga tahun tersebut, kemudian hasilnya dibagi 100.

Melalui metode ekstrapolasi, nilai tambah bruto harga konstan dihitung dengan mengalikan nilai tambah bruto pada tahun acuan dengan indeks kuantitas masing-masing tahun, lalu hasilnya dibagi 100.

1. Pendekatan untuk Menghitung GRDP Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan

Dalam menghitung GRDP berdasarkan penggunaan dengan harga konstan, estimasi umumnya diperoleh dengan mengalami nilai berdasarkan harga berlaku dari berbagai komponen pengeluaran melalui proses deflasi menggunakan indeks harga yang sesuai (BPS RI, 2008).

### Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita yang terus-menerus dalam jangka panjang sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dianggap penting untuk kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Dengan pertambahan penduduk setiap tahun, kebutuhan konsumsi meningkat, sehingga perlu adanya peningkatan pendapatan tahunan.

 Pertumbuhan ekonomi dapat berasal dari peningkatan permintaan dan penawaran agregat. Dari sisi permintaan agregat, peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat (konsumen), perusahaan, dan pemerintah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi memiliki potensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan jumlah pekerja secara merata, asalkan disertai dengan program pembangunan sosial (Machmud, 2016).

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi adalah bidang studi yang menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Teori Frederich List membagi pertumbuhan ekonomi menjadi empat tahap yang meliputi berburu, bertani, kerajinan, industri, dan perdagangan. Selain itu, Karl Bucher juga memberikan kontribusi dengan mengelompokkan pertumbuhan ekonomi menjadi masa rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia.

Werner Sombart, dalam memahami pertumbuhan ekonomi, membaginya menjadi tiga tingkatan, yakni masa perekonomian tertutup, masa kerajinan dan pertukangan, serta masa kapitalis. Di era masa kapitalis, Sombart bahkan membaginya menjadi empat masa yang berbeda, menyoroti perubahan dari kehidupan yang statis dan kekeluargaan hingga terciptanya golongan kapitalis yang mencari keuntungan dengan mempekerjakan kaum buruh.

Selain itu, Walt Whitman Rostow juga menyumbangkan pemikirannya dalam bukunya tentang lima tahap pertumbuhan ekonomi. Mulai dari masyarakat tradisional hingga mencapai tingkat konsumsi tinggi, Rostow menggambarkan perjalanan suatu masyarakat menuju kedewasaan ekonomi. Dalam tahap ini, sektor industri berperan penting dalam produksi barang konsumsi dan jasa, sementara pendapatan riil per kapita meningkat, membuka peluang konsumsi yang tinggi bagi masyarakat.

Teori Adam Smith menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertumbuhan populasi, yang akan menghasilkan peningkatan output ekonomi. Di sisi lain, David Ricardo mengemukakan bahwa pertumbuhan populasi yang signifikan, terutama jika mencapai dua kali lipat, akan menghasilkan surplus tenaga kerja yang dapat menyebabkan penurunan upah dan akhirnya stagnasi ekonomi.

Teori Robert Solow mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi melibatkan serangkaian aktivitas yang berasal dari manusia, akumulasi modal, penerapan teknologi modern, dan hasil produksi. Dampak pertumbuhan populasi dapat bersifat baik maupun buruk, oleh karena itu, peningkatan jumlah penduduk perlu dianggap sebagai sumber daya yang positif. Di sisi lain, Harrord Domar menyatakan bahwa penggunaan modal harus dilakukan dengan efisien karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peran pembentukan modal. Teori ini juga membahas aspek-aspek seperti pendapatan nasional dan peluang kerja (Machmud, 2016).

1. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian menggambarkan peran sektor-sektor dalam perekonomian, baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral menjadi primer, sekunder, dan tersier. Beberapa faktor yang memengaruhi perubahan struktur ekonomi, antara lain:

1. Produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan;
2. Modernisasi dalam meningkatkan nilai tambah bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi;
3. Kreativitas dan penerapan teknologi dengan kemampuan memperluas pasar produk atau jasa;
4. Kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor serta komoditas unggulan;
5. Infrastruktur yang mendukung aliran distribusi barang dan jasa serta proses produksi;
6. Semangat masyarakat untuk berwirausaha dan berinvestasi secara berkelanjutan;
7. Munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah daerah; dan
8. Terbukanya perdagangan luar daerah dan internasional melalui ekspor dan impor.

Menurut Machmud (2016), Struktur ekonomi dapat dilihat setidaknya berdasarkan empat sudut pandangan yaitu:

1. Tinjauan makro sektoral

Perekonomian dapat memiliki struktur agraris, industri, atau niaga tergantung pada sektor produksi yang menjadi pilar perekonomian tersebut. Berdasarkan lapangan usaha, sektor-sektor ekonomi di Indonesia dibagi menjadi tiga kelompok utama, meliputi:

1. Sektor primer, terdiri dari pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian.
2. Sektor sekunder, terdiri dari industri pengolahan, listrik, gas, air, dan konstruksi.
3. Sektor tersier, terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, transportasi, komunikasi, keuangan, persewaan, jasa perusahaan, serta berbagai jenis layanan, termasuk sektor pemerintahan.
4. Tinjauan keuangan

Struktur ekonomi dapat dibedakan antara tradisional dan modern, tergantung pada apakah teknologi yang digunakan di wilayah pedesaan bersifat tradisional atau di wilayah perkotaan menggunakan teknologi yang sudah relatif modern.

1. Tinjauan penyelenggaraan kenegaraan

Struktur ekonomi dapat bersifat etatis, egaliter, atau borjuis, tergantung pada golongan atau kelompok mana yang mendominasi peran utama dalam perekonomian tersebut.

1. Tinjauan birokrasi pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dapat dibedakan berdasarkan apakah struktur ekonominya bersifat sentralistis atau desentralisasi.

1. Perubahan Struktur Ekonomi

Pembangunan ekonomi jangka panjang mengakibatkan perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, yaitu dari model ekonomi tradisional yang memiliki pertanian sebagai sektor utama menuju model ekonomi modern yang didominasi oleh sektor non-primer, terutama industri manufaktur dengan konsep *increasing return to scale* (hubungan positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas) sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pula pendapatan per kapita, dan semakin cepat perubahan struktur ekonomi, dengan asumsi faktor-faktor pendukung seperti tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi (Machmud, 2016).

Teori Hollis Chenery, yang lebih dikenal Teori Transformasi Struktural (*Pattern of Development*), membahas perubahan struktur ekonomi di negara berkembang, mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai pendorong utama pertumbuhan. Peningkatan pendapatan per kapita mengubah pola konsumsi dari makanan dan kebutuhan pokok menjadi produk manufaktur dan jasa. Proses transformasi struktural dapat dipercepat dengan pergeseran pola permintaan konsumen ke produk manufaktur dan dukungan ekspor.

Menurut Machmud (2016), Kenaikan produksi sektor manufaktur disebabkan oleh empat faktor, yakni sebagai berikut:

* 1. Peningkatan permintaan domestik, termasuk permintaan langsung terhadap produksi industri manufaktur dan dampak tidak langsungnya pada sektor lain;
	2. Ekspansi ekspor (pertumbuhan dan diversifikasi), atau dampak total kenaikan ekspor terhadap produk industri manufaktur;
	3. Penggantian impor, atau dampak keseluruhan dari kenaikan proporsi permintaan yang dipenuhi melalui produksi domestik terhadap output industri manufaktur; dan
	4. Perubahan teknologi, atau dampak total perubahan koefisien input output dalam ekonomi karena kenaikan upah dan pendapatan terhadap sektor industri manufaktur.

Negara-negara berkembang mengalami perubahan ekonomi yang signifikan karena perbedaan dalam beberapa aspek, seperti kondisi awal ekonomi, besarnya pasar dalam negeri, distribusi pendapatan, karakteristik industrialisasi, keberadaan sumber daya alam (SDA), dan kebijakan perdagangan luar negeri. Faktor-faktor ini mempengaruhi laju industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi, dengan contoh seperti negara yang memiliki sektor industri dasar yang kuat cenderung mengalami industrialisasi lebih cepat dibandingkan yang hanya mengandalkan industri ringan.

Pasar domestik yang besar dan distribusi pendapatan yang merata juga menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan kebijakan perdagangan luar negeri, apakah terbuka atau tertutup, juga turut memengaruhi struktur ekonomi dan tingkat efisiensi suatu negara (Machmud, 2016).

1. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah ekonomi selama periode waktu tertentu. Penghitungan indikator ini bertujuan (Anisah, 2022):

1. Menilai kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan di wilayah tersebut;
2. Menjadi dasar proyeksi atau perkiraan pendapatan negara untuk perencanaan pembangunan nasional, sektoral, dan regional; dan
3. Menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha.

### Laba BUMD

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah badan usaha yang modalnya seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Badan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang berperan memberikan layanan kepada masyarakat dan memiliki tanggung jawab untuk mencapai keuntungan.

Keuntungan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat perannya sebagai lembaga profit yang bertujuan memaksimalkan deviden untuk meningkatkan pendapatan daerah (Dona dkk., 2022).

1. Bentuk-bentuk BUMD

Bentuk-bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibagi menjadi dua sebagaimana dijelaskan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut :

1. Perusahaan Umum Daerah

Perusahaan umum Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seluruh kepemilikan modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi dalam bentuk saham. Jika perusahaan umum daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah, perlu mengubah bentuk hukumnya menjadi perusahaan perseroan daerah. Selain itu, perusahaan ini dapat membentuk anak perusahaan atau memiliki saham pada perusahaan lain.

Laba perusahaan umum daerah ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan perundang-undangan, dan disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh kepala daerah sebagai pemilik modal. Laba tersebut dapat ditahan dengan persetujuan kepala daerah dan digunakan untuk investasi kembali (*reinvestment*) serta peningkatan pelayanan umum.

Pembubaran perusahaan umum daerah ditetapkan melalui Perda, dan kekayaan yang dikembalikan kepada Daerah diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Perusahaan ini juga dapat melakukan restrukturisasi untuk operasi yang efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

Organ Perusahaan Umum Daerah terbagi atas tiga yaitu pemilik modal yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Daerah, Direksi dan Dewan. Pengawas. Dalam menjalankan aktivitas bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peran utama dimainkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris, yang disebut sebagai Badan Pengawas.

Peraturan terkait penunjukan Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris, atau Badan Pengawas, untuk BUMD dijelaskan secara khusus dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah. Aspek-aspek yang diatur oleh keputusan ini mencakup:

1. Direksi
2. Direksi diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
3. Pengangkatan anggota Direksi ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
4. Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
5. Masa jabatan direksi adalah 4 tahun.
6. Dewan Komisaris/Badan Pengawas
7. Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
8. Pengangkatan Badan Pengawas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
9. Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.
10. Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 tahun.
11. Perusahaan Perseroan Daerah

Perusahaan Perseroan Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk perseroan terbatas, di mana modalnya terbagi dalam saham yang setidaknya 51% dimiliki oleh satu daerah. Pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan Perda, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Jika pemegang saham berasal dari beberapa daerah, salah satu daerah menjadi pemegang saham mayoritas. Selain itu, perusahaan ini memiliki kewenangan untuk membentuk anak perusahaan atau memiliki saham di perusahaan lain.

Sedikit berbeda dari BUMD berbentuk Perusahaan Umum Daerah. Perusahaan Perseroan Daerah memiliki struktur organ yang serupa dengan perseroan terbatas, yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang melibatkan:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham adalah pertemuan tahunan atau lainnya di mana para pemegang saham suatu perusahaan bersatu untuk membuat keputusan yang dicatat dalam akta notarial, dengan mematuhi ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan. RUPS memiliki wewenang untuk menentukan penunjukan direksi dan dewan komisaris perusahaan.

Rincian mengenai RUPS dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
2. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
3. RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan 16 kebutuhan untuk kepentingan perseroan.
4. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.
5. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
6. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
7. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
8. Direksi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Direksi adalah organ perseroan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam mengelola perseroan demi kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta direksi berfungsi sebagai perwakilan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar.

1. Dewan Komisaris

Tugas umum dewan komisaris yaitu melaksankan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan atau usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam mengambil tindakan atau keputusan, anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan harus berdasarkan keputusan bersama apabila terdapat lebih dari satu anggota dewan komisaris pada suatu BUMD.

1. Pendirian BUMD

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendirian BUMD dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Pendirian BUMD sebagaimana ketentuan pasal 331 ayat 4 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan;
2. Menyelenggarakan pelayanan umum berupa penyediaan barang/ jasa berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan melalui praktik tata kelola perusahaan yang efektif; dan
3. Meraih laba dan/atau keuntungan.
4. Modal BUMD

BUMD memperoleh modalnya melalui penyertaan modal dari keuangan daerah. Penyertaan modal oleh pemerintah daerah diatur sebagai kekayaan daerah yang terpisah sesuai dengan regulasi keuangan daerah, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya. Pemisahan kekayaan daerah dan modal yang disertakan dalam BUMD mencerminkan konsep hukum keperdataan di mana BUMD dianggap sebagai subjek hukum baru atau badan hukum yang dikenal sebagai *recht person*.

Sumber modal untuk BUMD, terutama yang berbentuk perseroan terbatas, dapat berasal dari berbagai sumber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk:

1. Penyertaan modal daerah;
2. Pinjaman;
3. Hibah; dan
4. Sumber modal lainnya seperti kapitalisasi cadangan, keuntungan, revaluasi aset, dan agio saham.
5. Peran BUMD dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah

Pemerintah Daerah setiap tahun menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD merupakan komponen yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam peningkatan pendapatan daerah oleh BUMD, pendapatan daerah didefinisikan sebagai penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah ekuitas dana merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dikembalikan oleh daerah (Helmi, 2018).

Laba BUMD yang menjadi pendapatan daerah dicatat dalam APBD atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terutama pada bagian Pendapatan Asli Daerah yang mencakup hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Laba tersebut dibagikan kepada pemegang saham, khususnya untuk BUMD berbentuk perusahaan perseroan daerah, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Tata cara penggunaan laba, termasuk pembagian kepada pemegang saham dalam BUMD berbentuk perseroan terbatas, diatur secara umum oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

1. Dividen dapat dibagikan oleh perseroan setelah laba bersihnya ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan yang diadakan maksimal 6 bulan setelah berakhirnya tahun buku.
2. Penetapan pembagian dividen dicatat dalam akta RUPS yang disusun di hadapan notaris.
3. Pemberian dividen kepada pemegang saham hanya diizinkan jika perusahaan memiliki saldo laba yang positif.

### Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus yang dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas berlebih di pasar, hingga masalah distribusi barang. Inflasi juga mencakup penurunan nilai mata uang secara terus-menerus. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menandakan adanya inflasi.

Inflasi dapat dianggap sebagai indikator perubahan tingkat harga yang terjadi secara berkesinambungan, dan kondisinya dianggap inflasi jika kenaikan harga berlangsung terus-menerus dan saling memengaruhi. Selain itu, istilah inflasi juga merujuk pada peningkatan persediaan uang yang kadang dianggap sebagai pemicu kenaikan harga (Wahab, 2012).

1. Klasifikasi Inflasi

Menurut Elmizan dan Asy’ari (2021), inflasi dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kelompok, sebagai berikut:

1. Inflasi Berdasarkan Penyebabnya
2. Inflasi tarikan permintaan (*demand pull inflation*), yaitu Kenaikan harga secara keseluruhan akibat peningkatan permintaan agregat.
3. Inflasi desakan biaya (*cost push inflation*), yaitu Kenaikan harga barang dan jasa secara umum sebagai hasil dari meningkatnya biaya produksi.
4. Inflasi Berdasarkan Asalnya

Inflasi dapat berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri. Inflasi dalam negeri dapat disebabkan oleh peningkatan komponen permintaan agregat, seperti pengeluaran konsumsi, investasi, dan pemerintah. Inflasi dari luar negeri bisa muncul akibat peningkatan ekspor atau kenaikan biaya impor bahan baku produksi.

1. Inflasi Berdasarkan Tingkat Keparahannya

Laju inflasi yang dihitung dengan persentase perubahan harga, dapat dinilai sebagai:

1. Laju inflasi ringan (<10%), yaitu Kenaikan harga yang lambat dan relatif kecil dalam jangka waktu tertentu.
2. Laju inflasi sedang (10%-30%), yaitu Kenaikan harga yang lebih cepat, memerlukan kewaspadaan terhadap dampaknya pada perekonomian.
3. Laju inflasi berat (30%-100%), yaitu Kenaikan harga yang signifikan, terkadang dalam waktu relatif singkat, dengan sifat akselerasi mingguan atau bulanan.
4. Hyperinflation (>100%), yaitu Tingkat inflasi yang ekstrem, menyebabkan hilangnya kepercayaan pada uang, dan nilai uang turun drastis, hingga masyarakat lebih memilih menukar uang dengan barang.
5. Inflasi Berdasarkan Sifatnya
6. Inflasi merayap, yaitu Pertumbuhan harga yang perlahan dan stabil.
7. Inflasi menengah, yaitu Pertumbuhan harga cukup tinggi, namun masih bisa diatasi dengan kebijakan fiskal dan moneter.
8. Hiperinflasi, yaitu Pertumbuhan harga yang sangat tinggi dan sulit dikendalikan oleh kebijakan fiskal maupun moneter.
9. Dampak Inflasi

Menjaga stabilitas harga atau tingkat inflasi adalah tanggung jawab utama bank sentral, termasuk Bank Indonesia, yang dianggap indikator efektif pengelolaan ekonomi nasional. Inflasi yang rendah dan stabil mencerminkan kesehatan ekonomi yang terkelola dengan baik. Inflasi memegang peranan signifikan dalam kehidupan masyarakat umum karena berpengaruh terhadap daya beli.

Bagi dunia usaha, laju inflasi menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah selalu memperhatikan faktor inflasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, dampak dari inflasi yang tinggi dan tidak stabil mencakup (Utari dkk., 2016):

1. Penurunan daya beli (*purchasing power*)

Inflasi tinggi mengakibatkan penurunan daya beli karena nilai uang yang semakin rendah. Hal ini berdampak pada berkurangnya jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan nilai uang yang sama. Kelompok masyarakat dengan penghasilan tetap dan rendah menjadi paling terdampak, dapat menyebabkan masalah sosial seperti peningkatan tuntutan kenaikan upah dan tingkat kemiskinan.

1. Kondisi ketidakpastian

Inflasi tinggi dan tidak stabil menciptakan ketidakpastian di masyarakat. Menentukan alokasi dana menjadi sulit, dan masyarakat cenderung menyimpan aset fisik daripada menabung di bank karena nilai uang cenderung merosot. Untuk dunia usaha, inflasi tinggi mengurangi insentif untuk berinvestasi karena ketidakpastian terkait keuntungan dan biaya di masa depan. Jangka panjang, kondisi ketidakpastian ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

1. Berkurangnya daya saing produk nasional

Inflasi tinggi meningkatkan biaya produksi sehingga produk nasional kehilangan daya saing, baik di pasar dalam negeri maupun ekspor. Dampaknya melibatkan peningkatan impor, yang berpengaruh pada performa neraca perdagangan dan neraca pembayaran.

1. Biaya Inflasi
2. Biaya karena inflasi yang terduga (*Cost of expected inflation*)
3. *Shoe-leather cost*

Saat inflasi tinggi, masyarakat cenderung mengurangi jumlah uang kas yang dipegang dengan harapan agar dana mereka mendapatkan bunga yang optimal dari penempatan di bank, karena nilai uang terus menurun. Istilah "*shoe-leather cost*" menggambarkan opportunity cost yang hilang, karena mereka harus sering pergi ke bank untuk mengambil uang, berbeda dengan saat inflasi rendah.

1. *Menu costs*

*Menu costs* mencakup biaya tambahan yang timbul karena pemilik usaha seringkali harus mengganti daftar harga barang dan jasa yang dijual pada masa inflasi tinggi. Menu costs dapat diartikan sebagai biaya tambahan yang muncul akibat perubahan harga yang tidak stabil.

1. Distorsi pajak

Laju inflasi dapat menyebabkan distorsi pada pajak pendapatan atau keuntungan yang dikenakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pajak yang dikenakan pada pendapatan atau laba nominal yang diperoleh menjadi terdistorsi oleh inflasi, karena sebagian pendapatan atau laba tersebut sudah tergerus oleh inflasi.

1. Peningkatan volatilitas harga relatif

Dalam situasi inflasi yang sangat fluktuatif, harga-harga secara relatif juga berubah terhadap tingkat harga umum. Hal ini dapat mendistorsi tingkat harga yang merupakan sinyal ekonomi penting. Perubahan dan variasi harga relatif yang disebabkan oleh ketidakpastian harga (inflasi) dapat menyebabkan pemborosan sumber daya ekonomi dalam upaya mencari harga yang berbeda-beda.

1. Biaya akibat inflasi yang tidak terduga (*Cost of unexpected inflation*)
2. Redistribusi Pendapatan

Biaya inflasi yang tidak terduga mencakup redistribusi pendapatan yang sewenang-wenang dari kreditur kepada debitur. Dalam kondisi inflasi, debitur mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan kreditur, karena pembayaran kembali pokok dan bunga atas uang yang dipinjam menjadi lebih kecil secara riil.

1. Biaya lainnya

Biaya yang tidak terduga juga termasuk biaya akibat kontrak nominal yang tetap. Kontrak jangka panjang yang tidak mempertimbangkan inflasi dapat merugikan pihak yang menggunakan kontrak tetap jika inflasi melebihi perkiraan semula (Utari dkk., 2016).

1. Mencegah Inflasi

Untuk mengendalikan inflasi, dapat digunakan kebijakan fiskal, moneter, atau kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan produksi (Wahab, 2012).

1. Kebijakan Moneter

Sasaran kebijakan moneter dapat dicapai dengan mengatur jumlah uang beredar, Bank Sentral menggunakan peralatan moneter, yaitu:

1. Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka, di mana Bank Sentral mengendalikan jumlah uang beredar melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga. Peningkatan jumlah uang beredar dilakukan dengan menjual surat-surat berharga, sementara penurunan dilakukan dengan membeli surat-surat berharga.
2. Penetapan Tingkat Diskonto, yang merupakan tingkat bunga pinjaman yang ditetapkan Bank Sentral kepada Bank Umum.
3. Penetapan Rasio Cadangan Wajib Minimum, yaitu proporsi cadangan yang harus dipegang oleh Bank Umum atas simpanan masyarakat. Untuk mengatasi inflasi, rasio cadangan minimum dapat dinaikkan, mengurangi jumlah uang beredar.
4. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal melibatkan pengaturan pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang dapat langsung mempengaruhi permintaan total, sehingga berdampak pada harga. Inflasi dapat dihindari dengan mengurangi permintaan total. Langkah-langkah fiskal, seperti pengurangan pengeluaran pemerintah dan peningkatan pajak, mampu mengurangi permintaan total, sehingga dapat mengendalikan inflasi.

1. Kebijakan yang Berkaitan dengan *Output*

Peningkatan *output* dapat meredakan laju inflasi. Langkah-langkah seperti penurunan bea masuk dapat meningkatkan jumlah *output*, mendorong impor, dan mengurangi harga barang dalam negeri.

1. Kebijakan Penentuan Harga dan Indexing

Penentuan harga berdasarkan indeks tertentu untuk gaji atau upah dapat membantu mengendalikan inflasi. Mekanisme ini mengatur penyesuaian gaji atau upah secara riil dengan kenaikan indeks harga, sehingga memberikan respons yang sesuai terhadap perubahan inflasi.

1. Jenis Angka Indeks dan Perhitungannya

Perubahan angka indeks dari satu periode ke periode lain, yang diungkapkan dalam persentase, mencerminkan besarnya angka inflasi dalam periode tersebut. Beberapa angka indeks umum yang digunakan untuk menghitung inflasi adalah (Elmizan dan Asy’ari, 2021):

1. *Producer Price Index* (PPI)/Indeks Harga Produsen (IHP), yaitu untuk mengukur perubahan harga yang diterima produsen domestik untuk barang yang diproduksi, mencerminkan tingkat harga pada tingkat produsen.
2. *Wholesale Price Index*/Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), yaitu untuk mengukur perubahan harga untuk transaksi antara penjual/pedagang besar pertama dan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama.
3. *Consumer Price Index* (CPI)/Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu indeks ini paling umum digunakan dalam menghitung inflasi. Disusun dari harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Selain ketiga indikator umum inflasi tersebut, terdapat dua indikator lain yang dapat menjadi alat ukur perubahan tingkat harga, yaitu:

1. PDB Deflator (Produk Domestik Bruto Deflator), yaitu untuk mengukur perubahan harga dalam perekonomian secara keseluruhan, dengan cakupan lebih luas daripada IHK dan IHPB. Diukur dengan membandingkan PDB nominal pada tahun tertentu dengan PDB pada tahun tertentu yang ditetapkan.
2. Indeks Harga Aset (HA), yaitu mencerminkan potensi tekanan permintaan ke depan melalui jalur *wealth effect*, dengan memperhatikan pergerakan harga aset seperti properti dan saham.

 Angka indeks dihitung secara periodik (bulanan, kuartalan, atau tahunan), dan laju inflasi dapat dihitung dari perubahan angka indeks dalam periode tertentu. Penghitungan inflasi secara bulanan disebut *month-to-month* (m-to-m), kuartalan sebagai *quarter-to-quarter* (q-to-q), dan tahunan sebagai *year-on-year* (yoy).

### Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah adalah pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (Nasution, 2019).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat 1 menjelaskan bahwa belanja daerah digunakan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota, termasuk urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Alokasi belanja yang tepat memiliki peran penting dalam mencapai stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau daerah. Selain itu, belanja juga berfungsi sebagai alat informasi untuk masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan dan dapat digunakan sebagai alat kontrol dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

1. Standar Pelayanan Minimal

Selain kurang efisien dalam melaksanakan pelayanan, praktik pungutan liar (pungli) di instansi pemerintahan telah menjadi pengetahuan umum. Ketidaksesuaian ini muncul karena kurangnya standar pelayanan publik, yang mengakibatkan kecepatan atau kelambatan pelayanan tergantung pada komisi yang terlibat. Standar pelayanan minimal menjadi penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat sebagai konsumen pelayanan.

Bagi pemerintah daerah, standar pelayanan minimal dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan biaya yang diperlukan dalam penyediaan pelayanan tertentu. Sementara bagi masyarakat, standar pelayanan minimal berperan sebagai panduan untuk menilai kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.

1. Analisis Standar Belanja

Dalam pengelolaan pemerintahan daerah, terjadi kecenderungan *Overhead Cost* yang tinggi, yang menyerap sumber daya terbatas untuk mendukung eksekutif dan legislatif daerah. Akibatnya, hanya sedikit sumber daya yang tersedia untuk kegiatan pelayanan, terlihat dari proporsi belanja publik yang lebih kecil dibandingkan belanja aparatur. Oleh karena itu, dalam perencanaan dan alokasi anggaran daerah, perlu mempertimbangkan instrumen pendukung seperti analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang sesuai dengan regulasi. analisis standar belanja bertujuan menilai kewajaran beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.

1. *Value for Money*

Sering kali sektor publik dianggap sebagai tempat yang tidak efisien, mengalami pemborosan sumber daya, kebocoran dana, dan instansi yang sering mengalami kerugian. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah perlu memperhatikan dan menerapkan konsep *Value for Money* (VFM) dalam pelaksanaan kegiatan.

*Value for Money* (VFM) menjadi kunci untuk membimbing pemerintah daerah menuju *good governance*, yang mencakup transparansi, ekonomis, efisiensi, responsif, dan akuntabilitas. Penerapan *Value for Money* (VFM) harus diintegrasikan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. *Value for Money* (VFM) adalah istilah yang digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi, terutama lembaga sektor publik, telah mencapai manfaat maksimum dari barang dan jasa yang dimiliki atau digunakan.

1. Analisis Belanja Modal

Dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah sering menghadapi tantangan dalam mengambil keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Penting untuk memberikan perhatian lebih besar pada pengeluaran untuk investasi publik daripada pengeluaran rutin (administratif), karena pengeluaran investasi/modal memiliki dampak jangka panjang, sementara pengeluaran rutin (administratif) lebih berdampak jangka pendek. Kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi tidak hanya mempengaruhi anggaran tahun berjalan, tetapi juga memberikan beban pada anggaran tahun-tahun mendatang.

1. Pengadaan Barang Jasa

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, tentu diperlukan logistik, peralatan, dan jasa yang mendukung optimalisasi kinerja instansi tersebut. Kebutuhan ini dipenuhi oleh berbagai pihak, baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi daripada di perusahaan swasta, terutama karena terkait dengan perhitungan APBN/APBD yang digunakan untuk pembayaran.

Proses ini juga terikat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah. Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana dijelaskan dalam Perpres tersebut, melibatkan kegiatan memperoleh barang/jasa oleh berbagai lembaga pemerintah, dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga penyelesaian seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, belanja diklasifikasikan berdasarkan:

1. Urusan

Belanja menurut urusan adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan sebagai wewenang provinsi atau kabupaten/kota, meliputi:

1. Urusan wajib

Belanja penyelenggaraan urusan wajib tersebut ditekankan pada perlindungan dan peningkatan mutu hidup masyarakat, dengan fokus pada pemenuhan tanggung jawab daerah melalui peningkatan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang memadai, serta pengembangan sistem jaminan sosial.

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib pemerintah daerah meliputi: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan Rakyat; Penataan Ruang; Lingkungan Hidup, Perencanaan Pembangunan; Perhubungan; Pertahanan; Kependudukan Dan Catatan Sipil; Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak; Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera; Sosial; Ketenagakerjaan; Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah; Penanaman Modal; Kebudayaan; Kepemudaan Dan Olah Raga; Persatuan Etnis dan Politik Dalam Negeri; Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah; Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Ketahanan Pangan; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Statistik; Kearsipan; Komunikasi Dan Informatika; dan Perpustakaan.

1. Urusan pilihan

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib pemerintah daerah meliputi: Pertanian; Kehutanan; Energi Dan Sumber Daya Mineral; Pariwisata; Kelautan dan Perikanan; Perdagangan; Industri; dan Ketransmigrasian.

1. Urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan

Dapat diuraikan dalam bentuk program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan mencapai keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara, meliputi: Pelayanan Umum; Ketertiban Dan Ketentraman; Ekonomi; Lingkungan Hidup; Perumahan dan Fasilitas Umum; Kesehatan; Pariwisata dan Budaya; Pendidikan; dan Perlindungan Sosial.

1. Fungsi

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan fungsi pemerintahan yang merupakan wewenang daerah.

1. Organisasi

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan struktur organisasi di setiap pemerintah daerah.

1. Kelompok

Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa kelompok belanja terdiri dari:

1. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dialokasikan tanpa keterkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi:

1. Belanja pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang, seperti gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS), pejabat negara, serta pegawai yang belum berstatus PNS, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1. Bunga

Belanja bunga bertujuan untuk menyusun anggaran pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) yang masih harus dibayar, sesuai dengan perjanjian pinjaman dalam jangka waktu pendek, menengah, dan panjang.

1. Subsidi

Belanja subsidi merupakan pengalokasian dana yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga tertentu dengan maksud agar harga jual produk atau jasa yang dihasilkan tetap terjangkau oleh masyarakat.

1. Hibah

Belanja hibah digunakan untuk mengalokasikan dana yang diberikan berupa uang, barang, atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dengan tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

1. Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk mengalokasikan dana yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menyusun anggaran dana bagi hasil yang berasal dari pendapatan provinsi ke kabupaten/kota, pendapatan kabupaten/kota ke pemerintah desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu ke pemerintah daerah lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk mengalokasikan dana bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun khusus, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya, atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya.

1. Belanja tidak terduga.

Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang bersifat responsif terhadap keadaan darurat, bertujuan mencegah dan mengatasi gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi mencapai keamanan dan ketertiban di daerah.

1. Belanja langsung

Belanja langsung adalah alokasi anggaran yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Jenis belanja langsung dibagi berdasarkan kategori sebagai berikut:

1. Belanja pegawai

Belanja pegawai pada kelompok ini meliputi pengeluaran honorarium/upah dalam Melibatkan pengeluaran honorarium atau upah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

1. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan barang dengan manfaat kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

1. Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran terkait pembelian atau pengadaan, serta pembangunan aset tetap berwujud dengan manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

## Penelitian Terdahulu

Berikut adalah referensi dari penelitian sebelumnya yang akan digunakan dan diupayakan oleh penulis untuk dibandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan, antara lain:

* + 1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Juliansyah dan Sulkadria (2018), menyatakan bahwa secara simultan total penduduk dan PDRB sama-sama mempengaruhi PAD. Sedangkan secara parsial total penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD dan PDRB berpengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten Simeulue. Dari penelitian tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis yaitu pada pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen dan PDRB sebagai variabel independen, sumber data, serta teknik analisis. Selain itu, terdapat perbedaan yaitu pada lokasi dan objek penelitian, serta periode penelitian.
		2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartika dan Drajad (2020), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah. Dari penelitian tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis yaitu pada pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen, serta sumber data. Selain itu, terdapat perbedaan yaitu pada lokasi dan objek penelitian, periode penelitian, serta teknik analisis.
		3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wadjaudje dkk. (2018), menyatakan bahwa secara simultan belanja modal, investasi, jumlah wisatawan, dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. sedangkan secara parsial belanja modal memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, investasi tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, jumlah wisatawan memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dari penelitian tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis yaitu pada pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen, sumber data, serta teknik analisis. Selain itu, terdapat perbedaan yaitu pada lokasi dan objek penelitian, serta periode penelitian.
		4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sirait (2019), menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PAD Kabupaten Merangin. Dari penelitian tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis yaitu pada pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen, serta sumber data. Selain itu, terdapat perbedaan yaitu pada lokasi dan objek penelitian, periode penelitian, serta teknik analisis
		5. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti dkk. (2023) menyatakan bahwa secara simultan Pajak daerah maupun laba BUMD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Batanghari. Sedangkan secara parsial, pajak daerah dan laba BUMD masing-masing berpengaruh positif terhadap PAD Kabupaten Batanghari. Dari penelitian tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis yaitu pada pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen dan laba BUMD sebagai variabel independen, sumber data, serta teknik analisis. Selain itu, terdapat perbedaan yaitu pada lokasi dan objek penelitian, serta periode penelitian.
		6. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dona dkk. (2022), menyatakan bahwa secara simultan pajak daerah, laba BUMD berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di provinsi sumatera selatan. sedangkan secara persial, pajak daerah berpengaruh positif atau signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan laba BUMD berpengaruh positif atau signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dari penelitian tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis yaitu pada pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen dan laba BUMD sebagai variabel independen, sumber data, serta teknik analisis. Selain itu, terdapat perbedaan yaitu pada lokasi dan objek penelitian, serta periode penelitian.
		7. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Luh dkk. (2021), menyatakan bahwa Secara simultan produk domestik regonal bruto, investasi, dan inflasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali. Sedangkan secara parsial, produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali. Dari penelitian tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis yaitu pada pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen dan inflasi sebagai variabel independen, sumber data, serta teknik analisis. Selain itu, terdapat perbedaan yaitu pada lokasi dan objek penelitian, serta periode penelitian.
		8. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Damanik dan Darasa (2022), menyatakan bahwa Secara simultan retribusi daerah dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Pematangsiantar. Sedangkan Secara parsial retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Pematangsiantar. Dari penelitian tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis yaitu pada pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen dan inflasi sebagai variabel independen, serta sumber data. Selain itu, terdapat perbedaan yaitu pada lokasi dan objek penelitian, periode penelitian, serta teknik analisis.
		9. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iman dkk. (2019), menyatakan bahwa secara simultan jumlah penduduk, PDRB dan belanja daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD. Sedangkan secara parsial, jumlah penduduk, PDRB dan belanja daerah secara masing-masing berpengaruh terhadap PAD. Dari penelitian tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis yaitu pada pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen dan PDRB, belanja daerah sebagai variabel independen, serta sumber data. Selain itu, terdapat perbedaan yaitu pada lokasi dan objek penelitian, periode penelitian, serta teknik analisis.
		10. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rafsanjani dan Suharno (2022), menyatakan bahwa alokasi belanja daerah dan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah. Dari penelitian tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis yaitu pada pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen dan belanja daerah sebagai variabel independen, sumber data, teknik analisis serta lokasi dan objek penelitian. Selain itu, terdapat perbedaan yaitu pada periode penelitian.

Dari beberapa penelitian terdahulu dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Peneliti dan Tahun** | **Judul Penelitian** | **Alat Analisis** | **Hasil Penelitian** |
| 1 | Hijri Juliansyah, Sulkadria (2018) | Pengaruh total penduduk dan produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Simeulue | Teknik analisis regresi linear berganda | Secara simultan total penduduk dan PDRB sama-sama mempengaruhi PAD. Sedangkan secara parsial total penduduk tidakberpengaruh terhadap PAD dan PDRB berpengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten Simeulue. |
| 2 | Dzakiyyah Ulfah Wadjaudje, Santi Susanti, Indra Pahala (2018) | Pengaruh belanja modal, investasi, jumlah wisatawan, dan pertumbuhan ekonomiterhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta | Teknik analisis regresi linear berganda | Secara simultan belanja modal, investasi, jumlah wisatawan, dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan secara parsial belanja modal memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, investasi tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, jumlah wisatawan memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. |
| 3 | Risna Wati Sirait (2019) | Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Merangin | Teknik analisis linear sederhana | Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PAD Kabupaten Merangin |
| 4 | Idham Nur Iman, Ima Amaliah, Meidy Haviz (2019) | Pengaruh jumlah penduduk, PDRB dan belanja daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung tahun 2000-2017 | Teknik analisis regresi linear berganda *ordinary least square* (ols) | Secara simultan jumlah penduduk, PDRB dan belanja daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD. Sedangkan secara parsial, jumlah penduduk, PDRB dan belanja daerah secara masing-masing berpengaruh terhadap PAD. |
| 5 | Aprilia Kartika, Dandy Ahmad Drajad(2020) | Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Berau | Teknik analisis regresi linear sederhana | Pertumbuhan ekonomiberpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah.  |
| 6 | Ni Luh Putu Wulandari, Made Kembar Sri Budhi (2021) | Pengaruh produk domestik regional bruto, investasi dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali | Teknik analisis regresi linear berganda  | Secara simultan produk domestik regonal bruto, investasi, dan inflasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali. Sedangkan secara parsial, produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali. |
| 7 | Eka Meiliya Dona, Agnes Widya Putri, Anis Feblin, Gitta Destalya Adrian Nova (2022) | Pengaruh pajak daerah, laba BUMD terhadap PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan | Teknik analisis regresi linear berganda | Secara simultan pajak daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan secara persial, pajak daerah berpengaruh positif atau signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpengaruh positif atau signifikan terhadap pendapatan asli daerah. |
| 8 | Helda Rafsanjani, Suharno (2022) | Analisis pengaruh belanja daerah, DBH dan DAU terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah | Teknik analisis regresi linear berganda | Alokasi belanja daerah dan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah. |
| 9 | Darwin Damanik, Pawer Darasa Panjaitan (2022) | Pengaruh retribusi daerah dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar | Teknik analisis regresi linear berganda *ordinary least square* (OLS) | Secara simultan retribusi daerah dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Pematangsiantar. Sedangkan Secara parsial retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Pematangsiantar |
| 10 | Tika Yuniarti, Muhammad Sabyan, Rina Widyanti (2023) | Analisis pengaruh pajak daerah dan laba bumd terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Batangahari | Teknik analisis regresi linear berganda | Secara simultan Pajak daerah maupun laba BUMD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Batanghari. Sedangkan secara parsial, pajak daerah dan laba BUMD masing-masing berpengaruh positif terhadap PAD Kabupaten Batanghari |

Sumber: Data yang diolah, 2024

## Kerangka Pemikiran Konseptual

Kerangka pemikiran konseptual disusun berdasarkan konsep/teori yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dengan mengacu pada landasan teori dan penelitian sebelumnya, penulis dapat secara logis menyajikan kerangka pemikiran yang mengikuti alur permasalahan penelitian. Pentingnya menguraikan keterkaitan antar variabel dalam kerangka pemikiran ini adalah untuk mendukung penyusunan ide dan informasi secara terstruktur, memudahkan analisis, serta menerapkan konsep (Sugiyono, 2013).

1. **Pengaruh *Gross Regional******Domestic Product* Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

*Gross Regional Domestic Product* adalah indikator yang digunakan untuk menilai kondisi ekonomi suatu wilayah. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula seseorang membayar pajak yang telah ditetapkan pemerintah (Ariyani dkk., 2018). Menurut Juliansyah & Sulkadria (2018), tingkat GRDP suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Hal ini disebabkan karena berbedanya potensi perekonomian dan tenaga ahli yang dimiliki daerah tersebut. Apabila suatu daerah memiliki sumber daya alam yang banyak dan daerah tersebut dapat mengelolanya dengan baik maka nilai GRDP daerah itu akan tinggi. Semakin tinggi GRDP secara langsung pajak daerah mengalami peningkatan, sehingga penerimaan pendapatan asli daerah juga mengalami peningkatan.

Semakin banyak masyarakat yang bekerja maka akan berpengaruh pada pendapatan. Semakin tinggi pendapatan masyarakat akan semakin tinggi juga permintaan barang dan jasa. Hal ini akan mengakibatkan semakin besar kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pajak dan retribusi yang ditarik pemerintah daerah. Sehingga pendapatan asli daerah juga akan meningkat (Iman dkk., 2019).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliansyah dan Sulkadria (2018), Luh dkk. (2021), serta Iman dkk. (2019) menyatakan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

1. **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Perekonomian bisa disebut mengalami pertumbuhan apabila aktivitas ekonomi mendapati proses dari setiap tahun berikutnya. Suatu daerah yang pertumbuhan ekonominya memberikan hasil yang positif akan meningkatkan pendapatan asli daerah (Juwita dan Widia, 2022). Kondisi perekonomiaan yang tumbuh dan berkembang akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan tersebut akan mempengaruhi tingkat daya beli dan konsumsi masyarakat. Semakin besar nilai GRDP di suatu daerah, maka akan semakin tinggi juga pertumbuhan ekonomi, maka pendapatan asli daerah ikut meningkat juga (Yunita dkk., 2018).

Tersedianya infrastruktur dan prasarana publik yang menunjang perekonomian dan peningkatan GRDP dapat memberikan semangat kepada para pelaku usaha sehingga kegiatan perekonomian meningkat dan maksimal yang menyebabkan pendapatan asli daerah menjadi bertambah (Luh dkk., 2021). Menurut Ariyani dkk. (2018), semakin tinggi GRDP per kapital riil suatu daerah, akan semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintah. Maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan pendapatan asli daerah untuk tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wadjaudje dkk. (2018) serta Sirait (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

1. **Pengaruh Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pendirian BUMD oleh pemerintah daerah memiliki tujuan utama tidak hanya untuk memberikan layanan kepada masyarakat, tetapi juga untuk mencapai keuntungan maksimal guna mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah tersebut (Dita dan Yuhertiana, 2023). Keuntungan yang dihasilkan oleh BUMD dapat menjadi sumber tambahan bagi pemerintah daerah. Meskipun kontribusinya mungkin tidak sebesar penerimaan pajak atau retribusi, laba BUMD tetap memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah, memperkuat daya dukung keuangan untuk pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Dona dkk., 2022).

Kenaikkan Laba BUMD dipengaruhi oleh besarnya jumlah laba yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan milik daerah yang terdiri dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankkan (Bank Pembangunan Daerah), jasa penyediaan air bersih (PDAM), jasa sektor industri pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Hasil laba BUMD adalah salah satu komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan potensi penerimaan pendapatan asli daerah. Peningkatan laba BUMD dapat menjadi indikator bagi daerah dalam mengevaluasi kemampuannya dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pendapatan asli daerah, dan ketika laba BUMD meningkat, pendapatan asli daerah juga akan mengalami peningkatan (Nisa Vera, 2020).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dona dkk. (2022) serta Yuniarti dkk. (2023) menyatakan bahwa laba BUMD berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

1. **Pengaruh Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Inflasi merupakan kondisi yang menandakan penurunan daya beli yang disertai dengan penurunan nilai riil dari mata uang suatu negara. Inflasi yang tinggi memiliki dampak signifikan pada ekonomi, terutama terhadap daya beli konsumen. Selain itu, tingkat inflasi juga berpengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD), yang dihitung berdasarkan omset penjualan seperti pajak hotel dan restoran. Ketika inflasi tinggi, biasanya terjadi kenaikan upah atau gaji karena upah riil terkait dengan produktivitas tenaga kerja. Namun, jika inflasi menurun, pelaku bisnis cenderung menaikkan harga yang menyebabkan nilai upah riil turun (Priyono dan Handayani, 2021).

Peningkatan pendapatan masyarakat perlu diimbangi dengan ketersediaan barang dan jasa. Jika harga barang dan jasa terus naik akan menyebabkan inflasi yang akan mempengaruhi kondisi ekonomi dan dapat mengurangi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi dengan mempertahankan inflasi pada tingkat yang rendah untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (Yunita dkk., 2018). Inflasi yang tinggi akan menjadi hambatan besar bagi pendapatan asli daerah dan juga berpotensi mengurangi produktivitas ekonomi masyarakat, namun inflasi yang rendah akan memberikan dampak positif terhadap pendapatan asli daerah (Damanik dan Darasa, 2022).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damanik dan Darasa (2022) serta Luh dkk. (2021) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah.

1. **Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pengelolaan dan alokasi anggaran daerah memiliki peran penting dalam pembangunan suatu daerah, termasuk anggaran daerah. Anggaran daerah berperan dalam mengalokasikan dana untuk kepentingan umum atau penyelenggaraan pemerintahan yang dapat meningkatkan layanan masyarakat. Tingkat pendapatan mempengaruhi kualitas pelayanan pemerintahan, kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik, dan kesuksesan program pembangunan. Peningkatan pendapatan asli daerah dapat membantu membiayai pengeluaran daerah, seperti belanja pegawai untuk pemberian gaji dan honorarium PNS, belanja barang dan jasa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, belanja modal untuk perolehan aset tetap, sehingga daerah menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada dana transfer pusat (Nahumuri, 2019).

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan program daerah sesuai dengan tujuan daerah tersebut (Rafsanjani dan Suharno, 2022). Pemerintah membutuhkan dana untuk mendanai kegiatan pemerintahan dengan mendorong masyarakat untuk membayar pajak. Ketika belanja daerah mengalami peningkatan, pemerintah akan meningkatkan penerimaan pajak daerah, sehingga hal tersebut akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Tingkat pengeluaran pemerintah daerah, sebagaimana tercermin dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (Nahumuri, 2019).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iman dkk. (2019) serta Rafsanjani dan Suharno (2022) menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti dibawah ini:

**GRDP**

**(X1)**

H1

H2

**Pertumbuhan Ekonomi**

**(X2)**

**Pendapatan**

**Asli Daerah**

**(Y)**

H3

**Laba BUMD**

**(X3)**

H4

H5

**Inflasi**

**(X4)**

**Belanja Daerah**

**(X5)**

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran Konseptual

## Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang diajukan untuk menggambarkan dugaan sementara tentang hubungan atau pengaruh antara dua variabel. Dianggap sementara, karena jawaban dalam hipotesis hanya didasarkan pada teori yang relevan, tanpa dukungan fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2013).

Adapun hipotesis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : *Gross regional domestik product* berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

H2 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

H3 : Laba BUMD berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

H4 : Inflasi berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

H5 : Belanja daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu metode yang menekankan pada penggunaan data dalam bentuk angka dan analisis ststistik untuk menguji hipotesis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan, yang menggunakan literatur seperti buku, catatan, dan laporan penelitian terdahulu. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dimana peneliti menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasi data untuk memecahkan masalah yang ada terkait pengaruh *gross regional domestic product*, pertumbuhan ekonomi, laba BUMD, inflasi, serta belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

## Populasi dan Sampel

1. **Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah populasi yang digunakan yaitu sebanyak 35 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022.

1. **Sampel**

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan menggunakan sampel jenuh (sensus). Sampel jenuh adalah seluruh anggota populasi diambil sebagai sampel. Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 35 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2022. Kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempublikasi dan menyajikan data PDRB, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan Laporan Realisasi APBD selama periode 2018-2022.

Berikut daftar 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai kelengkapan data selama periode 2018-2022 adalah:

Tabel 3. 1

Daftar Sampel

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kabupaten/Kota** | **No** | **Nama Kabupaten/Kota** |
| 1 | Kabupaten Banjarnegara | 19 | Kabupaten Pemalang |
| 2 | Kabupaten Banyumas | 20 | Kabupaten Purbalingga |
| 3 | Kabupaten Batang | 21 | Kabupaten Purworejo |
| 4 | Kabupaten Blora | 22 | Kabupaten Rembang |
| 5 | Kabupaten Boyolali | 23 | Kabupaten Semarang |
| 6 | Kabupaten Brebes | 24 | Kabupaten Sragen |
| 7 | Kabupaten Cilacap | 25 | Kabupaten Sukoharjo |
| 8 | Kabupaten Demak | 26 | Kabupaten Tegal |
| 9 | Kabupaten Grobogan | 27 | Kabupaten Temanggung |
| 10 | Kabupaten Jepara | 28 | Kabupaten Wonogiri |
| 11 | Kabupaten Karanganyar | 29 | Kabupaten Wonosobo |
| 12 | Kabupaten Kebumen | 30 | Kota Magelang |
| 13 | Kabupaten Kendal  | 31 | Kota Pekalongan |
| 14 | Kabupaten Klaten | 32 | Kota Salatiga |
| 15 | Kabupaten Kudus | 33 | Kota Semarang |
| 16 | Kabupaten Magelang | 34 | Kota Surakarta |
| 17 | Kabupaten Pati | 35 | Kota Tegal |
| 18 | Kabupaten Pekalongan |  |  |

Sumber : Data yang diolah, 2024

## Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. **Definisi Konseptual**
2. Variabel Dependen

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu bentuk penerimaan keuangan suatu daerah yang berasal dari potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

$$PAD =Ln Total Pendapatan Asli Daerah$$

1. Variabel Independen
2. *Gross Regional Domestik Product* (X1)

*Gross Regional Domestik Product* (GRDP) adalah nilai tambah semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah regional atau provinsi selama satu tahun (Juwita dan Widia, 2022).

$$PDRB=\sum\_{i=1}^{n}NTB\_{i }$$

1. Pertumbuhan Ekonomi (X2)

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan nilai riil dari produk nasional bruto atau pendapatan nasional. Dengan kata lain, ekonomi dianggap tumbuh atau berkembang ketika terjadi peningkatan produksi riil (Suot dkk., 2021).

$$PE=\frac{PDRB\_{t}-PDRB\_{t-1}}{PDRB\_{t-1}}×100\%$$

1. Laba BUMD (X3)

Laba BUMD merupakan pendapatan daerah yang berasal dari hasil usaha perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, melalui sistem pembagian hasil bersama dengan badan usaha terkait (Nisa Vera, 2020).

$$Laba BUMD=Ln Total Laba BUMD$$

1. Inflasi (X4)

Inflasi dapat didefinisikan sebagai proses kenaikkan harga barang atau jasa berlaku umum dalam suatu perekonomian secara terus menerus. Tingkat inflasi berbeda-beda dalam suatu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain (Oktiani, 2021).

$$INF\_{t}=\frac{IHK\_{t}-IHK\_{t-1}}{IHK\_{t-1}}×100\%$$

1. Belanja Daerah (X5)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah merupakan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah untuk mendanai seluruh pelaksanaan urusan pemerintah daerah.

$$BD=Ln Total Belanja Daerah$$

1. **Operasional Variabel**

Operasional variabel adalah cara yang digunakan untuk mengukur atau mengamati suatu variabel dalam penelitian. Berikut ini adalah tabel operasional dalam penelitian ini:

Tabel 3. 2

Operasional Variabel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Indikator** | **Skala** |
| Pendapatan Asli Daerah (Y) | Total Ln Realisasi Pendapatan Asli Daerah | Rasio |
| *Gross Regional Domestic Product* (X1) | Total Ln *Gross Regional Domestic Product* Atas Dasar Harga Berlaku | Rasio |
| Pertumbuhan Ekonomi (X2) | Total Pertumbuhan Ekonomi | Rasio |
| Laba BUMD (X3) | Total Ln Laba BUMD | Rasio |
| Inflasi (X4) | Tingkat Inflasi | Rasio |
| Belanja Daerah (X5) | Total Ln Realisasi Belanja Daerah | Rasio |

Sumber : Data yang diolah, 2024

## Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis tersusun dalam sebuah arsip (data dokumenter) yang telah dipublikasikan. Data yang digunakan adalah data time series dalam 5 (lima) periode yaitu 2018-2022, meliputi *gross regional domestic product*, pertumbuhan ekonomi, laba BUMD, inflasi, serta belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik dokumentasi yaitu suatu cara memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian dengan jalan melihat kembali laporan tertulis yang lalu baik berupa angka maupun keterangan berasal dari data PDRB, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan Laporan Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022 dengan melakukan akses di website Badan Pusat Statistik (BPS) dan website masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui pendalaman literatur-literatur yang berkaitan dengan objek studi dengan cara mengamati, mencatat, dan mempelajari jurnal, buku-buku, dokumen skiripsi, tesis, serta data penunjuang lainnya.

## Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis yang diolah melalui program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*).

1. **Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif memberikan deskripsi mengenai data berdasarkan rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Analisis statistik deskriptif adalah proses mengumpulkan, meringkas, dan menyajikan data untuk memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik dan pola dari data tersebut (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif diterapkan pada sampel pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022.

1. **Uji Asumsi Klasik**

Sebelum menggunakan model regresi untuk menguji hipotesis data, perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan model data memenuhi kriteria yang diperlukan. Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk memastikan bahwa sampel bebas dari masalah normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Berikut adalah uji asumsi klasik yang dilakukan:

1. Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi atau variabel-variabel independen dan dependen memiliki distribusi data yang normal. Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Metode pengujian yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Parametik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang digunakan. Uji *Kolmogorov-Smirnov* merupakan perbandingan antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Menurut uji *Kolmogorov-Smirnov*, data dianggap normal jika nilai *asymptotic* signifikan > 0,05 (Ghozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah sebagai berikut:

1. Jika probabilitas nilai Z dari uji K-S signifikan secara statistik, maka Hipotesis ditolak, yang menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal.
2. Jika probabilitas nilai Z dari uji K-S tidak signifikan secara statistik, maka Hipotesis diterima, yang menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.
3. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah adanya korelasi variabel-variabel independen diantara satu dengan yang lainnya. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan memeriksa *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai tolerance. Kedua ukuran ini menunjukkan sejauh mana satu variabel independen bergantung pada yang lain. Multikolinearitas terjadi jika nilai tolerance < 0,10 atau VIF > 10. Jika nilai kedua ukuran tersebut tidak ada yang melebihi, maka dapat dikatakan bahwa multikolinearitas yang tidak terjadi atau bebas dari gejala multikolinearitas (Ghozali, 2018).

1. Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada model regresi linear di periode t dengan kesalahan pengganggu di periode t-1 atau periode sebelumnya. Autokorelasi terjadi ketika observasi yang berurutan sepanjang waktu saling berkaitan (Ghozali, 2018). Penelitian ini menggunakan pengujian autokorelasi yang dilakukan dengan pengujian Durbin-Watson dengan tingkat pengujian autokorelasi sebagai berikut:

1. d < dL : Terdapat autokorelasi positif.
2. dL < d < dU : Ragu-ragu.
3. dU < d < 4 - dU  : Tidak terdapat autokorelasi.
4. 4 - dL < d : Terdapat autokorelasi negatif.
5. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan varian dalam residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

Penelitian ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser yaitu untuk mengetahui apakah sebuah model regresi terjadi heteroskedastisitas. Dalam uji Glejser, residual regresi diestimasi dan kemudian diregresikan terhadap satu atau lebih transformasi dari variabel independen, seperti nilai absolut dari variabel independen atau akar kuadratnya. Model persamaan regresi dianggap tidak terjadi heteroskedastisitas, jika dalam uji Glejser nilai signifikansi > 0,05 (Ghozali, 2018).

1. **Regresi Linier Berganda**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah metode yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami seberapa kuat hubungan antara variabel independen tersebut dengan variabel dependen, serta untuk membuat prediksi tentang nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diberikan (Ghozali, 2018).

Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, yakni pengaruh *gross regional domestic product,* pertumbuhan ekonomi, laba BUMD, inflasi, dan belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Analisis regresi ganda dapat dijabarkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y=α+β\_{1}X\_{1}+β\_{2}X\_{2}+β\_{3}X\_{3}+β\_{4}X\_{4}+β\_{5}X\_{5}+e$$

Keterangan:

Y = Pendapatan asli daerah.

α = Konstanta.

β1-β5 = Koefisien regresi masing-masing variabel independen.

X1 = *Gross regional domestic product.*

X2 = Pertumbuhan ekonomi.

X3 = Laba BUMD.

X4 = Inflasi.

X5 = Belanja daerah.

 e = *Error*/Residual.

1. **Uji Hipotesis**
2. Uji F (Uji Kelayakan Model)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi layak digunakan dalam penelitian ini atau tidak (Ghozali, 2018). Untuk menguji hipotesis ini digunakan uji statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan < 0,05 atau Fhitung > Ftabel, maka Hipotesis diterima. Artinya, model persamaan regresi penelitian ini layak digunakan.
2. Jika nilai signifikan > 0,05 atau Fhitung < Ftabel, maka Hipotesis ditolak. Artinya, model persamaan regresi penelitian ini tidak layak digunakan.
3. Uji t (Uji Parsial)

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel independen lainnya konstan/tetap (Ghozali, 2018). Pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikan pada tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikan sebesar 0,05. Kriteria pengambilan keputusan dalam Uji t yaitu sebagai berikut:

* 1. Jika nilai signifikan < 0,05 atau thitung > ttabel, maka Hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
	2. Jika nilai signifikan > 0,05 atau thitung < ttabel, maka Hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana model regresi dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Ketika nilai (R²) mendekati satu, hal tersebut menandakan bahwa variabel independen memberikan sebagian besar informasi untuk memprediksi variasi variabel dependen. Namun, jika nilai (R2) rendah, menunjukkan keterbatasan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam program SPSS, uji ini mengacu pada nilai *Adjusted R-Squared*, yang dapat berubah jika ada penambahan variabel independen dalam model (Ghozali, 2018).